

**GOLONGAN KARYA DI SULAWESI SELATAN
(1965-1973)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarja Sastra
pada Fakultas Sastra**

oleh

**EDY
811 98 020**

PERPUSTAKAAN - UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	14-11-2003
Asal Dari	FAK. SASTRA
Banyaknya	2 (dua) Eksp
Harga	Modal
No. Inventaris	021114 114
No. Plat	17131

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASAR**

2003

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor :
824/J04.111.6/PP.27/2002, tanggal 7 Mei 2002, dengan ini kami menyatakan
menerima dan menyetujui Skripsi ini.

Makassar,... Agustus 2003

Pembimbing Utama


Drs. Abd. Latif, M. Hum.

Pembantu Pembimbing

Drs. Dias Pradadimura, M.A.

Disetujui untuk diteruskan
Kepada Panitia Ujian Skripsi

Dekan

Ub. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah


Dr. Edward L. Poelinggomang

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA**





Pada Hari ini, Sabtu Tanggal 23 Agustus 2003, Tim penguji menerima baik Skripsi yang berjudul :

**GOLONGAN KARYA DI SULAWESI SELATAN
(1965-1973)**

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir sarjana pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Agustus 2003

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Prof. Dra. Marrang Paranoang, M.S. Ketua	1. 
2.	Dra. Nahdiah Nur, M. Hum. Sekretaris	2.
3.	Dr. Edward L. Poelinggomang, Penguji I	3. 
4.	Drs. Daud Limbugau, S.U. Penguji II	4. 
5.	Drs. Abd. Latif, M. Hum. Konsultan I	5. 
6.	Drs. Dias Pradadimara, M.A. Konsultan II	6.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin penulis panjatkan karna atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam proses meraih gelar sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Sejauh perhatian bertumpu pada skripsi ini, maka itu tidak lain dari pembahasan tentang Golongan Karya di Sulawesi Selatan tahun 1965-1973. Dengan dibahasnya Golongan Karya, maka diharapkan dapat memperkaya khasanah perpustakaan kita dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang organisasi politik ini.

Keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama pembimbing utama dan Pembantu Pembimbing, dalam hal ini Bapak Drs. Abd. Latief M. Hum, dan Drs. Dias Pradadimara, yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, karenanya kepada beliau penulis menyampaikan terima kasih. Terima kasih dan penghargaan setinggitingginya tak lupa pula penulis sampaikan kepada:

1. Yang penulis cintai dan banggakan Bapak Dewang dan Ibu Syariah sebagai orang tua penulis. Saudara-saudaraku Syamsunandar, Darwis, dan Asril, yang selama ini memberi dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.



2. Bapak Dekan dan para pembantu Dekan serta segenap Dosen khususnya Dosen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menjalani masa kuliah dengan baik.
3. Segenap rekan-rekan mahasiswa, handai taulan dan para sahabat penulis : Padli, Chenk maniozt, Lia, Selvi, Athie', Nasrun Arifin, Muh. Rusman_SS, Ebai, Kahar, A. Itak, Yuli, Eman, Anto, dan yang lainnya, yang telah memberikan dukun,,ann%a baik moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Para karyawan dan karyawan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah melayani dan memberikan kemudahan dalam pengurusan kegiatan akademik penulis. Semua pihak yang penulis tak dapat menyebutkan satu persatu didalam skripsi ini yang telah memberikan perhatiannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentulah tak luput dari kesalahan dan kehilafan, oleh sebab itu keritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Semoga bermanfaat adanya. Amin Rabbal Alamin.

Makassar, 23 Agustus, 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	HALAMAN
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metodologi.....	9
BAB II. KONDISI POLITIK SULAWESI SELATAN 1945-1965	
A. Peranan Militer Di Sulawesi Selatan 1945-1965.....	12
B. Peranan Partai Politik 1945-1965.....	18
BAB III. GOLONGAN DAN ORDE BARU DI SULAWESI SELATAN (1965-1971)	26
A. Kelahiran Sekretariat Bersama Golongan Karya.....	34
B. Peranan Orde Baru Terhadap Golkar di Sulawesi Selatan.....	39
C. Politik Di Sulawesi Selatan.....	
BAB IV. GOLONGAN KARYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK DI SULAWESI SELATAN	
A. Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Politik di Sulawesi Selatan : Munculnya Militer Dalam Politik di Sulawesi Selatan.....	43
B. Golongan Karya Dalam Kehidupan Sosial Politik di Sulawesi Selatan.....	52
C. Golongan Karya Setelah Pemilihan Umum 1971.....	56
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

A.1 Daftar Nama-Nama Pangdam Di Sulawesi Selatan Dan Riwayat Hidupnya	73
A.2 Daftar Nama-Nama Gubernur Sulawesi Selatan Dan Riwayat Hidupnya	78
A.3 Susunan DPD Golkar Tk I Sulawesi Selatan	81
A.4 Tabel Hasil Pemilu 1955	85
A.5 Tabel Hasil Pemilu Mulai Pemilu 1971-1982	86
A.6 Daftar Riwayat Hidup A.R. Kandji	90

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah.

Menurut Meriam Budiarjo, "sejarah politik adalah sejarah tentang negara atau sejarah tentang cara-cara yang dipakai manusia untuk hidup bersama didalam menata dan mempertahankannya serta berinteraksi dengan unit-unit sosial lain."¹

Partai politik merupakan sarana untuk memobilisasi kepentingan rakyat untuk kemudian diperjuangkan oleh pigr partai politik. Dalam arti modern, partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Kedua pandangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ichlasul Amal, bahwa "partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis yang mampu mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi serta menyediakan suksesi kepemimpinan yang absah (legitimate) dan damai".²

Berdasarkan batasan-batasan diatas, maka dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan mengkaji mengenai Golongan Karya (GOLKAR) di

¹ Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, (Jakarta, Gramedia, 1977). hal. 160.

² Dr. Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Ujung Pandang, LPIIS, Universitas Hasanuddin, 1992). hal. XV.

Sulawesi Selatan sebagai pokok permasalahan. Golkar (Golongan Karya) sebagai organisasi sosial politik yang tumbuh dan berkembang dan berperan penting dalam kehidupan sosial politik di daerah ini.

Golongan Karya sebagai organisasi politik yang baru lahir tapi mendapat dukungan dari pemerintahan Orde Baru dan Militer, telah membawa pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang telah ada sebelumnya. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya perubahan peta politik di Indonesia, yang ditandai dengan terjadinya pergeseran kekuatan politik dari politisi sipil ke kekuatan militer. Partai politik pada tahun 1973 menampilkan dua partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta satu organisasi politik yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan peleburan dari partai-partai Islam : Partai Muslim Indonesia, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Islam Perti, dan Partai Nahdatul Ulama. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah peleburan dari : partai IPKI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, dan Partai Nasional Indonesia. Adapun Golongan Karya (GOLKAR), terdiri dari beberapa golongan yakni golongan buruh dan pegawai, pokok golongan tani, pokok golongan pengusaha nasional, pokok golongan bersenjata, pokok golongan alim ulama, angkatan proklamasi 17 Agustus 1945, dan angkatan jasa. Fenomena politik ini yang menjadi pendorong penulis untuk membahas tentang *GOLONGAN KARYA DI SULAWESI SELATAN (1965 – 1973)*, sebagai tema pokok dalam penulisan.

Sejarah perkembangan partai politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1950-an peran partai politik sebagai sahan kehendak golongan yang memikul satu ideologi tampak menonjol. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya peran partai politik mengalami perubahan yang mendasar, yakni hilangnya kepercayaan dari pemerintah, sebagai akibat dari kegagalan konstituante dalam menetapkan dasar negara pada tahun 1959.

Dengan kondisi partai politik yang seakan-akan tidak penting, maka pada tahun 1961 terjadi penyederhanaan partai. Partai politik yang ada sebelum terjadi penyederhanaan pada tahun 1961, yakni : Masyumi, PSI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Murba, PSII, IPKI, PKI, dan Perti. Setelah terjadi penyederhanaan partai politik pada tahun 1961, jumlah partai yang diakui tinggal sepuluh. Kesepuluh partai tersebut adalah : PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Murba, PSII, IPKI, PKI, dan Perti. Akan tetapi, penyederhanaan itu menimbulkan masalah dalam pemerintahan Orde Lama, yakni semakin meruncingnya pertentangan ideologi dari partai politik dan masyarakat. Munculnya gerakan-gerakan separatisme di daerah-daerah yang mengarah ke disintegrasi bangsa menambah buruknya situasi politik di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan muncul beberapa kali gerakan separatisme, mulai dari NIT, DI/TII dan PERMESTA. Situasi ini sangat mempengaruhi stabilitas keamanan dan kondisi perpolitikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat situasi bangsa yang sudah berada diambang

kehancuran, akibat dilanda krisis, baik itu krisis ekonomi, maupun krisis politik. Situasi politik seperti ini, yang mendorong sejumlah himpunan satuan-satuan massa yang tidak bernaung di bawah partai politik membentuk organisasi yang diberi nama "*Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)*"³

Sekber Golkar kemudian tumbuh dan berkembang, serta mampu bersaing dengan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Sekber Golkar merupakan organisasi politik yang mendukung kelahiran Orde Baru, sehingga ketika Orde Baru berkuasa, maka organisasi ini mendapat dukungan yang besar dari pemerintah.

Pertumbuhan dan perkembangan Sekber Golkar telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem perpolitikan di Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah-daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, Sekber Golkar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu cepat dan membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan sosial politik di daerah ini. Sebelum tahun 1973 partai politik yang ada di daerah ini, seperti : PSII, PNI, NU, MASYUMI, PARKINDO, dan PKI, semakin berada pada posisi yang sangat memprihatinkan setelah muncul Sekber Golkar. Banyaknya basis massa partai politik yang beralih ke Sekber Golkar merupakan salah satu faktor keterpurukan partai politik yang ada di Sulawesi Selatan.

³ Imam Prastignyo, *Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar, Perjuangan Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Jakarta, Yayasan Bhakti, 1982). hal. 73.

Setelah Sekber Golkar melakukan beberapa kali proses reorganisasi, maka terjadi perubahan nama dari Sekber Golkar menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971. Pertumbuhan dan perkembangan Golkar yang didukung oleh pemerintahan Orde Baru dan Militer telah mampu membawa perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah-daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan terjadi dengan adanya hubungan saling mendukung antara Golkar dengan pemerintahan Orde Baru dan Militer, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuatan politik dari kekuatan politisi sipil ke kekuatan militer.

Pergeseran kekuatan politik ini diawali ketika pemerintahan Orde Lama beralih ke pemerintahan Orde Baru. Peralihan itu mengalami proses yang begitu panjang dan merupakan titik awal kelahiran Sekber GOLKAR, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi sarana politik Orde Baru. Sebagai suatu organisasi politik, Golkar juga menjalankan fungsinya seperti yang biasa dijalankan oleh partai politik, yakni sebagai sarana komunikasi politik yang meliputi penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) dan perumusan kepentingan (*interest articulation*) sebagai sarana rekrutmen politik.⁴ Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Golkar telah banyak berperan dalam kehidupan sosial politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di Sulawesi Selatan,

⁴ Meriam Budiorjo, *op-cit.* hal. 163-169.

Golkar telah membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial politik sejak kehadirannya di daerah ini.

B. Batasan Masalah dan Tujuan Penulisan

Tulisan ini akan membahas mengenai proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru yang disertai dengan munculnya Golkar sebagai pendukung utama pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya akan dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan partai politik di Sulawesi Selatan serta kelahiran Golkar yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan sosial politik di Sulawesi Selatan.

Dalam proses peralihan itu, di Indonesia terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial politik baik di pusat maupun di daerah. Sekber Golkar yang dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1964 menampakkan perannya ketika kondisi bangsa tidak menentu akibat munculnya pemberontakan di daerah-daerah. Sekber Golkar bekerja sama dengan kaum militer, pemuda, mahasiswa dan rakyat berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Lama, yang kemudian diganti oleh pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Lama terjadi pemberontakan di daerah-daerah yang mengarah pada perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Sulawesi Selatan sendiri terjadi beberapa kali pemberontakan yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial politik di daerah ini. Kondisi politik yang demikian menjadi pendorong sehingga kaum militer di Sulawesi Selatan mengambil peranan penting dalam

pemerintahan, ketika Andi Ahmad Rivai menjadi Gubernur pada tahun 1965. Peran militer di daerah ini berlanjut hingga memasuki pemerintahan Orde Baru.

Di Sulawesi Selatan, Golkar sebagai pendukung utama sekaligus berfungsi sebagai sarana politik Orde Baru telah mampu mendominasi peran penting dalam kehidupan sosial politik di daerah ini sejak kemenangannya pada pemilihan umum 1971.

Dari uraian di atas, maka penulis membahas masalah pada proses peralihan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru disertai dengan terjadinya kondisi politik di Sulawesi Selatan yang tidak menentu sebagai akibat dari kekacauan yang disebabkan oleh para pemberontak. Situasi yang kacau seperti itu sangat mengganggu stabilitas keamanan di daerah ini yang tentunya akan berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan partai politik.

Namun kondisi itu dapat diatasi ketika Orde Baru berkuasa dan didukung oleh Golkar sebagai pengambil kebijakan, baik di DPR dan MPR maupun DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.

Periode yang dibahas dalam tulisan ini adalah tahun 1965 – 1973. Tahun 1965 diambil sebagai batasan temporal dalam tulisan ini karena tahun 1965 merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Munculnya Orde Baru yang didukung oleh Sekber Golkar merupakan reaksi terhadap pemerintahan Orde Lama yang tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Ketidakmampuan Orde Lama mengatasi krisis, baik politik maupun ekonomi, telah menimbulkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin meruncingnya pertentangan

antar partai politik dan makin meluasnya gerakan separatisme di daerah sebagai bukti keterpurukan pemerintahan Orde Lama ditambah lagi munculnya gerakan G.30.S/PKI. Adapun batasan 1973 dianggap penting, karena pada tahun ini terjadi peleburan partai politik. Dari peleburan partai politik ini, maka di Indonesia terdapat tiga kekuatan politik, yaitu dua partai politik dan satu organisasi politik. Kedua partai politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sedangkan organisasi politik yang dimaksud adalah Golongan Karya (GOLKAR).

Tujuan penulisan ini akan dikaitkan dengan batasan masalah yang telah ditentukan, yakni merekonstruksi kembali tentang :

1. Bagaimana kondisi politik dan keamanan di Sulawesi Selatan selama periode 1945 – 1965 yang dipokuskan pada peran militer dan partai politik di daerah ini. 2. Bagaimana Sekber Golkar dan pemerintahan Orde Baru, dimulai dari kelahiran Sekber Golkar dan peran pemerintahan Orde Baru dalam mengembangkan Organisasi ini yang akan dihubungkan dengan peran Sulawesi Selatan dalam menegakkan Orde Baru dan meruntuhkan rezim Orde Lama.

3. Bagaimana Golkar dalam kehidupan sosial politik di Sulawesi Selatan yang akan dibagi dalam tiga sub pembahasan yakni: Partai politik di Sulawesi Selatan sebelum lahirnya Sekber Golkar, kedua Golkar sebagai salah satu kekuatan sosial politik di Sulawesi Selatan, dan yang terakhir akan membahas mengenai bagaimana Golkar di Sulawesi Selatan setelah pemilihan umum 197.



antar partai politik dan makin meluasnya gerakan separatisme di daerah sebagai bukti keterpurukan pemerintahan Orde Lama ditambah lagi munculnya gerakan G.30.S./PKI. Adapun batasan 1973 dianggap penting, karena pada tahun ini terjadi peleburan partai politik. Dari peleburan partai politik ini, maka di Indonesia terdapat tiga kekuatan politik, yaitu dua partai politik dan satu organisasi politik. Kedua partai politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sedangkan organisasi politik yang dimaksud adalah Golongan Karya (GOLKAR).

Tujuan penulisan ini akan dikaitkan dengan batasan masalah yang telah ditentukan, yakni merekonstruksi kembali tentang :

1. Bagaimana kondisi politik dan keamanan di Sulawesi Selatan selama periode 1945 – 1965 yang dipokuskan pada peran militer dan partai politik di daerah ini.
2. Bagaimana Sekber Golkar dan pemerintahan Orde Baru, dimulai dari kelahiran Sekber Golkar dan peran pemerintahan Orde Baru dalam mengembangkan Organisasi ini yang akan dihubungkan dengan peran Sulawesi Selatan dalam menegakkan Orde Baru dan meruntuhkan rezim Orde Lama.

3. Bagaimana Golkar dalam kehidupan sosial politik di Sulawesi Selatan yang akan dibagi dalam tiga sub pembahasan yakni: Partai politik di Sulawesi Selatan sebelum lahirnya Sekber Golkar, kedua Golkar sebagai salah satu kekuatan sosial politik di Sulawesi Selatan, dan yang terakhir akan membahas mengenai bagaimana Golkar di Sulawesi Selatan setelah pemilihan umum 1977.

C. METODOLOGI

Untuk mengisahkan suatu peristiwa masa lampau berdasarkan data-data yang diperoleh, maka dianggap perlu untuk menggunakan suatu metode penulisan, yakni metode sejarah. Metode sejarah dapat diartikan sebagai suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁵

Dalam menulis tentang bagaimana Golkar di Sulawesi Selatan selama periode 1965-1973, yang dikaitkan dengan batasan masalah yang telah ditentukan, maka proses penulisan ini akan menggunakan metode sejarah. Sebagai langkah pertama dari metode ini adalah mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan sasaran kajian, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diartikan sebagai kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi panca indra lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa diceritakannya. Sumber primer dapat berupa dokumen yang dapat diperoleh di arsip atau di pengurus partai, baik itu ditingkat I maupun tingkat II. Sedangkan sumber sekunder, merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni dari seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisalkannya.⁶

⁵ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta, Yayasan penerbit UI Press, 1975). hal. 35.

⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta, PT Tiara wacana Yogya, 1964). hal.23.

Sumber sekunder dapat berupa majalah, jurnal, surat kabar, wawancara, dan buku-buku yang relevan dengan teori yang akan dibahas.⁷

Jika sumber-sumber yang didapatkan belum cukup, maka penulis akan melakukan wawancara. Dalam wawancara, penulis akan mewawancarai orang-orang yang banyak tahu tentang masalah yang akan dikaji, baik itu dari pengurus atau mantan pengurus Golkar maupun pengurus atau mantan pengurus partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan tidak menutup kemungkinan penulis akan mewawancarai orang yang bukan pengurus salah satu partai, tapi banyak tahu mengenai batasan masalah yang ingin diteliti.

Setelah sumber-sumber terkumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber yang ada. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ini bertujuan untuk menemukan data yang valid dengan mengkritik apa isi sumber itu dapat diterima sebagai kenyataan agar tulisan ini dapat mengarah pada penulisan yang bersifat objektif.

Tahap selanjutnya adalah tahap historiografi atau penulisan. Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses.⁸ Pada tahap ini penulis akan memberikan interpretasi arah makna yang terkandung dalam data-data yang lolos dalam penyeleksian. Interpretasi bertujuan untuk mengaitkan fakta-fakta menjadi

⁷ *Ibid.* hal. 23.

⁸ *Ibid.* hal.32.

kisah sejarah dengan landasan menurut kronologis peristiwa secara sistematis dengan pendekatan deskriptif analitik.⁹

⁹ *Ibid.* Hal. 32-33.

BAB II KONDISI POLITIK DI SULAWESI SELATAN (1945 – 1965)

A. Peran Militer di Sulawesi Selatan 1945 – 1965.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia telah menciptakan beberapa kerangka politik dan konstitusional besar guna mencapai tujuan seperti yang ditetapkan oleh para pemimpinnya. Langkah awal politik di Indonesia ditandai dengan keluarnya maklumat wakil presiden No.X, tanggal 16 Oktober 1945, yang disusul kemudian dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.

Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, maka lahirlah sistem multi partai dan sistem demokrasi liberal. Banyaknya partai politik dan tidak satupun partai politik yang mampu menjadi mayoritas mutlak di DPR atau KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), maka setiap kabinet selalu merupakan kabinet koalisi. Kondisi perpolitikan seperti ini merupakan faktor utama yang menyebabkan kabinet selalu berganti-ganti, sehingga pembagunan tidak dapat terlaksana, karena setiap kabinet tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja. Disamping itu, situasi ini juga sebagai penyebab munculnya berbagai macam krisis di Indonesia, baik krisis politik maupun krisis ekonomi. Krisis politik merupakan krisis yang paling menonjol, terbukti dengan terjadinya perdebatan tentang ideologi negara. Sebagai dampak dari perdebatan itu, maka timbul perpecahan dwitunggal

Soekarno-Hatta, yang pada akhirnya memunculkan gerakan separatisme yang mengarah pada disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini terjadi di beberapa daerah termasuk diantaranya Sulawesi Selatan. Gerakan –gerakan separatis seperti DI/TII terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. PRRI/PERMESTA terjadi di Sumatera dan Sulawesi.

Pada tahun 1950 di Sulawesi Selatan muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Asiz. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh hasil Komprensi Meja Bundar (KMB) yang menyebabkan Indonesia menjadi Negara Serikat (RIS), sementara Andi Asiz ingin mempertahankan kelangsungan Negara Indonesia Timur. Hasil Komprensi Meja Bundar ini juga menimbulkan dua pola pendapat politik di Sulawesi Selatan yakni:¹

1. Golongan federalis antara lain A. Massarapi, AC. Manoppo Boesat A. Basok, yang kesemuanya adalah anggota Parlemen Negara Indonesia Timur. Ide federalis ini tidak mendapatkan tempat di kalangan masyarakat banyak
2. Golongan unitaris yang jauh lebih besar jumlahnya yang terdiri dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan para pemuda pejuang.

¹ Agustinus, *Palang Merah Indonesia (PMI) di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1998), hal 22.

Golongan Unitaris bekerjasama dengan TNI dalam usaha menumpas pemberontakan Andi Azis. Langkah awal yang diambil oleh Golongan ini adalah mengadakan konferensi di Polobangkeng pada tanggal 5-7 February 1950. Konferensi ini bertujuan untuk membentuk wadah perjuangan yang disebut Biro Perjuangan Pengikut Republik Indonesia (Biro PPR1). Mereka menghasilkan resolusi yang isinya sebagai berikut :²

1. Bubarkan NIT dan RIS dan kembali ke Yogyakarta
2. Datangkan Tentara Nasional untuk menjaga keamanan di Sulawesi Selatan.

Akan tetapi hal itu tidak mengurangi keinginan Andi Asiz untuk tetap mempertahankan NIT. Meskipun mendapat tekanan massa yang menghendaki NIT dileburkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun Andi Asiz tetap pada pendiriannya. Bahkan ia mengancam akan menghalangi pendaratan pasukan bersenjata RIS yang datang dari Jawa.

Sebagai tindak lanjut dari ancamannya, Andi Asiz kemudian menyerang unit-unit tentara Republik di Makassar yang disertai dengan penangkapan terhadap perwira-perwiranya.³ Atas tindakannya, maka pemerintah pusat mengirim satu kekuatan militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Alex Kawilarang dibantu

² *Ibid.*, hal. 22

³ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat-Daerah, Kasus Sumatra dan Sulawesi-Selatan 1943-1979*, (Yogyakarta, Pusat antar Universitas Studi Sosial, UGM, 1992), hal. 74.



oleh Mayor Andi Mattalatta⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, Kawilarang dan Andi Mattalatta selalu berusaha mengurangi kemungkinan konflik bersenjata dengan jalan melakukan perundingan. Akhirnya, setelah beberapa kali melakukan perundingan dan mengeluarkan ancaman ke pihak NIT, Kawilarang dan Andi Mattalatta berhasil membujuk Andi Asiz untuk pergi ke Jakarta. Ketika Andi Asiz sampai di Jakarta, ia kemudian ditangkap.

Lain halnya dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini dipicu oleh beberapa faktor yang antara lain, karena adanya penolakan pemerintah pusat terhadap tuntutan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). KGSS menginginkan penggabungan seluruh unit gerilya di Sulawesi Selatan ke dalam Brigade Hasanuddin dan pegangkatan Kahar Muzakkar sebagai komandannya.⁵

Akan tetapi, tuntutan KGSS tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah, sehingga Kahar Muzakkar dan anak buahnya masuk ke hutan dan mulai melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakkar, maka pemerintah pusat di bawah pemerintahan kabinet Sukiman menugaskan Kawilarang untuk melakukan operasi militer. Setelah Kawilarang melakukan operasi militer, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka satuan ini diganti pimpinannya oleh Kolonel Gatot Subroto. Dalam menjalankan tugasnya, Kolonel Gatot Subroto selalu menyertai tindakan militernya dengan

⁴ Lihat, Riwayat Hidup, *Andi Mattalatta*, pada daftar nama-nama Pangdam di Sulawesi Selatan. Lampiran I.

⁵ Ichlasul Amal, *op-cit.* hal 77.

taktik-taktik politik. Tindakannya itu telah memperlihatkan hasil yang memuaskan pada tahun 1952, ketika ia berhasil memasukkan kembali beberapa komandan Batalyon Gerilya serta anak buahnya ke dalam militer. Mereka yang dimasukkan kembali ke dalam militer antara lain : Andi Sose, Makatan Daeng Sibali, AsisTaba, M. Arief, dan Andi Sellek.⁷⁶

Meskipun banyak anak buahnya yang berhianat, tapi Kahar Muzakkar terus melanjutkan perjuangannya hingga berakhir pada tahun 1965. Untuk mengatasi pemberontakan itu, maka pemerintah pusat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakkar yakni dengan melakukan perundingan.

Pada akhir tahun 1961, Kahar Muzakkar dan Letkol Yusuf⁷⁷ sebagai wakil pemerintah melakukan perundingan di Bone Pute. Dalam pertemuan itu dicapai persetujuan, bahwa Kahar Muzakkar bersedia menyerahkan semua pasukannya kepada Yusuf Amir, kecuali pasukan Momoc Ansharulla (pengawal pribadi Kahar Muzakkar).⁷⁸ Namun persetujuan tersebut tidak pernah terlaksana hingga berakhirnya pemberontakan Kahar Muzakkar pada tahun 1965.

Kahar Muzakkar sendiri tertembak mati pada tanggal 3 Februari 1965 di dekat sungai Lasolo Sulawesi Tenggara oleh patroli Siliwangi dari Batalyon

⁷⁶ *Ibid*, hal 80-81.

⁷⁷ Libat, *Riwayat Hidup, Letkol Amir Yusuf*, pada daftar nama-nama Pangdam di Sulawesi Selatan, Lampiran I.

⁷⁸ Abd. Latif, *Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan*, dalam Edward L. Poelinggomang and Suriadi Mappangara, *Dunia Militer di Indonesia, Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta, UGM Press, 2000). hal 24.

330/Kujang. Jasadnya dikirim ke Makassar dengan Helikopter, akan tetapi hingga kini kuburannya tidak pernah diungkap.⁹

Selain pemberontakan Andi Asiz dan Kahar Muzakkar, di Sulawesi Selatan juga dipengaruhi oleh adanya pemberontakan PRRI/PERMESTA yang wilayah cakupannya meliputi seluruh Sulawesi. Akan tetapi pemberontakan ini kemudian menyerah kepada tentara pemerintah dalam tahun 1961, karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan amnesty terhadap mereka yang menyerah dalam periode tertentu.¹⁰

Peran militer di Sulawesi Selatan memang begitu banyak, selain berhasil menumpas pemberontakan di daerah ini, mereka juga banyak berperan dalam memperbaiki infrastruktur ekonomi. Pada tahun 1964 kaum militer mengadakan program "civil mission" yang sebagian merupakan suatu strategi untuk melawan pemberontakan Kahar Muzakkar. Dalam pelaksanaan program tersebut, kaum militer membangun dan merehabilitasi jalan-jalan, jembatan-jembatan dan sistem irigasi.¹¹ Kegiatan kaum militer di Sulawesi Selatan terus berlanjut hingga memasuki era pemerintahan Orde Baru.

Pada awal pemerintahan Orde Baru dilaporkan banyak jembatan-jembatan sementara yang telah dibangun oleh kaum militer di Sulawesi Selatan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat. Memang program militer ini

⁹ Barbara Sillar Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989), hal 328.

¹⁰ Ickasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah*, Ibid. hal 146.

¹¹ *Ibid.* hal 295.

mungkin kurang berpengaruh banyak bagi kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan, tapi tindakan mereka setidaknya telah memberi kesan bagi masyarakat di daerah ini.

B. Peranan Partai Politik 1945 – 1965.

Dengan kondisi keamanan yang tidak menentu, kekacauan terjadi dimana-mana sebagai akibat dari pemberontakan yang tentunya banyak membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial politik di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan dan perkembangan partai politik di daerah ini mendapat ancaman dari kaum pemberontak.

Kondisi keamanan yang tidak stabil sangat berdampak terhadap pemerintahan, baik terhadap pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Ketika di Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan ternyata di pusat juga terjadi gejolak politik yang melibatkan beberapa partai politik. Sebagai puncak dari pertentangan partai-partai politik dalam era demokrasi liberal adalah kegagalan konstituante dalam menetapkan konstitusi negara pada tahun 1959. Persaingan partai politik untuk memperoleh kekuasaan, dan kepentingan mereka yang sangat beragam menjadikan koalisi mereka selalu berumur pendek.

Dalam kondisi bangsa yang sudah berada diambang kehancuran, maka Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, yang dalam pembukaannya memuat Pancasila yang resmi dan asli sebagai dasar negara kita. Pada tahun 1959 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari Demokrasi Liberal ke sistem Demokrasi Terpimpin.

Memasuki masa sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengembangkan gagasan NASAKOM (Nasional Agama dan Komunis) dan partai politik berdasarkan NASAKOM yang menjurus kearah pengkotak-kotakan masyarakat. Gagasan NASAKOM menginginkan agar semua lembaga-lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan, terutama golongan fungsional di NASAKOM.¹² Golongan fungsional ini yang nantinya akan menjadi suatu organisasi yang berusaha membendung pengaruh PKI. Golongan Fungsional itu terdiri dari 7 bagian, yakni sebagai berikut:¹³

1. Golongan buruh dan pegawai.
2. Pokok golongan tani
3. pokok golongan pengusaha Nasional
4. Pokok golongan bersenjata (AD, AL, AU, Polisi, Veteran, OPR, OPD)
5. Pokok golongan Alim ulama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu)
6. Angkatan proklamasi 17 Agustus 1945
7. Angkatan jasa (cendikiawan, guru, pendidik, seniman, wartawan daerah, pemuda, wanita dan warga negara peranakan).

Sebagai perlawanan terhadap tekanan partai-partai politik, terutama PKI dan dalam rangka usaha pelaksanaan UUD 1945 maka atas dorongan dan dukungan ABRI golongan fungsional yang tidak bernaung di bawah partai politik

¹² DPP Golkar, *Bahan Diklat Kader Golkar, Kelompok B*, (Jakarta, 1995). hal 7.

¹³ Roberto Bagun, *Derectory Golkar Pembangunan*, (Jakarta, Yayasan Tri Sukses, 1994). hal 68.

Memasuki masa sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengembangkan gagasan NASAKOM (Nasional Agama dan Komunis) dan partai politik berdasarkan NASAKOM yang menjurus kearah pengkotak-kotakan masyarakat. Gagasan NASAKOM menginginkan agar semua lembaga-lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan, terutama golongan fungsional di NASAKOM.¹² Golongan fungsional ini yang nantinya akan menjadi suatu organisasi yang berusaha membendung pengaruh PKI. Golongan Fungsional itu terdiri dari 7 bagian, yakni sebagai berikut:¹³

1. Golongan buruh dan pegawai.
2. Pokok golongan tani
3. pokok golongan pengusaha Nasional
4. Pokok golongan bersenjata (AD, AL, AU, Polisi, Veteran, OPR, OPD)
5. Pokok golongan Alim ulama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu)
6. Angkatan proklamasi 17 Agustus 1945
7. Angkatan jasa (cendikiawan, guru, pendidik, seniman, wartawan daerah, pemuda, wanita dan warga negara peranakan).

Sebagai perlawanan terhadap tekanan partai-partai politik, terutama PKI dan dalam rangka usaha pelaksanaan UUD 1945 maka atas dorongan dan dukungan ABRI golongan fungsional yang tidak bernaung di bawah partai politik

¹² DPP Golkar, *Bahan Diklat Kader Golkar, Kelompok B*, (Jakarta, 1995). hal 7.

¹³ Roberto Bagun, *Directory Golkar Pembangunan*, (Jakarta, Yayasan Tri Sukses, 1994). hal 68.

berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya dalam masyarakat. Atas dorongan ABRI, maka golongan fungsional membentuk organisasi yang diberi nama Sekretariat Bersama Golongan Karya pada tanggal 20 oktober 1964. Organisasi ini yang nantinya menjai Golkar setelah mengalami beberapa reorganisasi.

Peranan Sekber Golkar mulai nampak ketika meletusnya penghianatan G.30.S/PKI. Sekber Golkar ikut bersama ABRI, pemuda, mahasiswa dan rakyat yang Pancasilais dalam menumpas penghianatan PKI. Hasilnya dalam waktu yang singkat gerakan PKI dapat ditumpas secara fisik.

Setelah G.30.S/PKI dapat ditumpas, maka militer membangun suatu strategi untuk mencapai kepentingannya dengan jalan menjadi payung bagi para demonstrasi yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan ormas-ormas Islam untuk menentang kebijakan politik dan ekonomi Soekarno. Alhasil strategi konflik yang dibangun militer mulai menampakkan hasil pada bulan Maret 1966, setelah penggelaran pasukan tak dikenal yang berbaur dengan massa demonstran di depan istana Merdeka mampu memberi tekanan psikologis yang pada akhirnya memaksa Soekarno menyerahkan sebuah surat perintah kepada Mampangad Letjen Soeharto.¹⁴

¹⁴ Reiza D. Dienaputra, *Militer di Tengah Suksesi Kepemimpinan Nasional, Eksistensi 1967 dan Suksesi 1998*, dalam Edward L. Poelinggomang and Suriadi Mappangara, *Dunia Militer di Indonesia, Keberadaan dan peran Militer di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta, UGM pres, 2000). hal 164.

Dalam kondisi bangsa yang tidak menentu dan stabilitas keamanan yang sudah tidak menjamin dalam menjalankan roda pemerintahan, maka dikeluarkanlah Supersemar tanggal 11 Maret 1966, dan ini merupakan titik awal lahirnya Orde Baru.¹⁵ Akibat dari krisis politik yang berkepanjangan di pusat ternyata juga berdampak ke daerah-daerah termasuk Sulawesi-Selatan.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa selama periode 1962-1965 di Sulawesi-Selatan masih berlanjut pemberontakan Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini yang menjadi perisai Sulawesi-Selatan dari polarisasi ideologis yang ditanggung oleh PKI.¹⁶ Selain itu pengaruh politik dari pusat tidak terlalu nampak di Sulawesi-Selatan, juga disebabkan oleh penetrasi politik di daerah ini yang relatif dangkal.

Selama masa jaya partai tahun 1950-1957 tidak satupun dari partai-partai tersebut yang pernah berkembang dengan baik di Sulawesi-Selatan. Partai yang kuat pada masa itu adalah Masyumi. Dalam pemilu 1955 di Sulawesi Selatan, Masyumi memperoleh 39,7 persen suara.¹⁷ Keberhasilan Masyumi dalam pemilihan-pemilihan berkaitan dengan otoritas tokoh-tokoh Aristokrat. Mereka tertarik pada Masyumi karena mereka mengharapkan partai tersebut sebagai partai yang relatif konservatif dan secara nasional merupakan partai yang terkuat, mampu dan mau melindungi posisi mereka sebagai penguasa dan pemimpin

¹⁵ *Ibid.*, hal 9.

¹⁶ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah*, hal 166.

¹⁷ Lihat, *Tabel Hasil pemilu 1955*, Lampiran IV.

daerah."¹⁸ Para tokoh Aristokrat, memandang Masyumi sebagai suatu sarana untuk melindungi identitas etnis Sulawesi-Selatan dalam menghadapi orang-orang Jawa dan Manado yang memegang peranan utama di wilayah ini.

Partai politik yang ada di Sulawesi Selatan dalam tahun 1955 sangat banyak, baik itu yang berdasarkan agama dan kebangsaan maupun partai yang berdasarkan Marxisme. Partai politik yang berdasarkan agama dan kebangsaan antara lain : Masyumi, Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Nahdatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (PIR), Parindra, Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Lembaga Indonesia Maluku (LIM), Lembaga Indonesia Sulawesi Selatan (LISS), Partai Politik Tharikat Islam (PPTI), Partai Federal Indonesia (PFI), Badan Pernasyarakatatan Kewarganegaraan Indonesia (BAPESKI), Pergerakan Tarbiah Islamiyah (Perti). Sedangkan partai yang berdasarkan Marxisme antarlain : Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Murba, Partai Buruh Daerah Sulawesi Selatan."¹⁹

Khusus untuk partai berdasarkan Marxisme daerah pertumbuhan dan perkembangannya sangat terbatas di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, antara lain : Di Makassar terdapat Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh, Bonthain dan Benteng terdapat Partai Komunis

¹⁸ Ichlasul Amal, *loc-cit.* hal 166.

¹⁹ Arsip Propinsi Sulawesi Selatan, *Peta dan Daftar Partai-partai Politik yang berdasarkan Agama Kebangsaan dan Marxisme*, (Propinsi Sulawesi Selatan, 1955), No. Reg. 237. Kode Dos, 27.

Indonesia (PKI), Pare-Pare (Tanette) terdapat partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Luwu (Palopo, Makale, Rantepao) terdapat Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).²⁰

Pada perkembangan selanjutnya Masyumi mengalami penurunan dalam tahun 1958 ketika militer muncul sebagai partner senior dalam koalisi yang dominan dengan pemimpin Aristokrat Sulawesi-Selatan. Dari hubungan antara Aristokrat dengan militer mampu menciptakan suatu proses lokalisasi atau "Buginisasi dan Makassarisasi".²¹ Hal ini yang menyebabkan sehingga banyak putra-putra daerah yang menempati posisi penting baik pada pemerintahan sipil maupun militer di Sulawesi-selatan.

Ketika kaum militer menjadi pemegang kekuasaan di Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan pemimpin Aristokrat lokal, maka pertumbuhan dan perkembangan partai di daerah ini, terutama Masyumi mengalami hambatan. Kekuasaan militer dimulai ketika Andi Rivai menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 1960.²²

Pada tahun 1959 Kolonel Yusuf ditunjuk sebagai Komandan Kodam Hasanuddin menggantikan Andi Mattalatta. Mengawali perannya, Kolonel Yusuf mengambil langkah yang berani, yakni melarang semua aktivitas PKI dalam wilayah yuridiksinya. Akan tetapi larangan itu mendapat tekanan dari Presiden

²⁰ *Ibid*, Arsip propinsi Sulawesi Selatan.

²¹ Ielasal Amal, *hubungan pusat daerah*, *op-cit.* hal 167

²² Lihat, *Riwayat Hidup, Andi Rivai*, pada Daftar Nama-nama Gubernur Sulawesi Selatan, Lampiran II.

Soekarno, sehingga Yusuf kemudian mencabut kembali larangannya itu. Namun ia tetap membatasi gerakan PKI di daerah ini.

Menyinggung soal pertumbuhan dan perkembangan PKI di Sulawesi-Selatan, sebelum kudeta pada bulan oktober 1965. Memang PKI tumbuh dengan cepat di Sulawesi-Selatan selama kurang lebih 18 bulan sebelum peristiwa G.30.S/PKI, akan tetapi gerakannya terbatas pada pusat-pusat kota di Makassar dan Pare-pare.

Untuk membendung pengaruh PKI di Sulawesi Selatan, maka Kolonel Yusuf melakukan kerja sama dengan institusi-institusi negara di tingkat lokal, dan mendukung organisasi pemuda Islam khususnya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang didominasi oleh orang Bugis-Makassar, untuk melakukan propaganda kounter terhadap PKI. Selain itu, Yusuf Amir juga memprakarsai, terbentuknya SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), yang dengan organisasi ini diharapkan anggota-anggota partai terlarang, misalnya Masyumi dan PSI, berkesempatan untuk aktif kembali dalam kegiatan politik.²³

Pada perkembangan selanjutnya kehidupan sosial politik di Sulawesi Selatan mengalami perubahan, ketika hadirnya personil militer non putra daerah sebagai akibat dari dipilihnya Makassar sebagai markas operasi militer dalam kampanye Irian Barat tahun 1961-1962, yang berlanjut hingga periode politik Ganyang Malaysia pada tahun 1963.

²³ Abd. Latif, *Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan*, dalam Edward L. Poelinggomang and Suriyadi Mappangara, *Dunia Militer di Indonesia*. op-cit, hal 256.

Dampak dari politik konfrontasi dengan Malaysia telah melahirkan konflik dan persaingan dalam negeri yang tidak hanya militer dengan PKI, tetapi juga antara kalangan militer sendiri. Makassar merupakan arena penting dari konflik ini. Dalam kondisi perpolitikan di daerah Sulawesi Selatan yang semakin tidak menentu, maka Kolonel Yusuf minta bantuan dari Batalyon Siliwangi.

Peran kaum militer di Sulawesi Selatan terus berlanjut hingga memasuki periode Orde Baru. Pada bulan Mei 1966, Kolonel Ahmad Lamo²⁴ menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, menggantikan Andi Rivai. Dalam mengawali pemerintahannya, Ahmad Lamo menjaga jarak dengan politik sehari-hari. Akan tetapi otoritasnya dibayang-bayangi oleh panglima Kodam Brigadir Jenderal Solichin G.P.²⁵

²⁴ Lihat, *Riwayat Hidup, Ahmad Lamo, pada daftar nama-nama Gubernur di Sulawesi selatan, Lampiran II.*

²⁵ Lihat, *riwayat Hidup, Solichin G.P., pada daftar nama-nama Pangdam di Sulawesi Selatan, Lampiran I.*

BAB III
GOLONGAN KARYA DAN ORDE BARU DI SULAWESI SELATAN
(1965 – 1971)

A. Kelahiran Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dan Tegaknya Orde Baru

Setelah Orde Baru lahir, sejak dikeluarkannya Supersemar tanggal 11 maret 1966, maka langkah awal yang diambil adalah memantapkan diri. Dalam usaha tersebut, Orde Baru bekerja sama dengan Sekber Golkar. Sekber Golkar yang sejak kelahirannya tanggal 20 Oktober 1964 merupakan pendukung utama usaha Orde Baru untuk berkuasa.

Pada tanggal 9-11 Desember 1965 diadakan Mukernas Sekber Golkar yang pertama, dengan tema "Konsolidasi Organisasi dan Partisipasi Terhadap timbulnya Orde Baru".¹ Mukernas itu berhasil menyusun program konsolidasi organisasi dan program perjuangan di segala bidang dalam rangka menegakkan Orde Baru. Dalam Mukernas yang diadakan di Cibogo melahirkan beberapa keputusan yakni:²

1. Haluan perjuangan Sekber Golkar.
2. Program aksi Sekber Golkar Fron Nasional.
3. Program konsolidasi Organisasi.
4. Program pengkaderan.

¹ DPP Golkar, *op-cit.* hal 9.

² Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer, Study Tentang Budaya politik*, (Jakarta LPJES, 1992), hal 29.



5. Pernyataan Sekber Golkar.
6. Dewan pimpinan harian Sekber Golkar.

Ketika jumlah organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar semakin banyak hingga mencapai 262 pada tahun 1967. Hal ini menjadi pendorong bagi ketua umum Sekber Golkar, Sokowati yang dibantu oleh Gondohutomo untuk melakukan penyederhanaan. Hasil dari penyederhanaan itu, ditetapkan 7 kelompok induk organisasi (KINO) yang tergabung dalam Sekber Golkar. Ke-7 KINO itu adalah sebagai berikut :²

1. Kosgoro (Koperasi Swadiri Gotong Royong).
2. Soksi (Swadiri Organisasi Karya Seluruh Indonesia)
3. MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Rayong)
4. Ormas Hankam (Organisasi-organisasi Massa yang ada di Departemen Hankam)
5. Gakari (Perkumpulan Pengawai Negeri)
6. Karya Propesi (Perhimpunan Profesional seperti Advokat, Dokter dan Lain-lain).
7. Karya Pembangunan.

Setelah pengelompokan selesai, maka dibentuk pelaksana harian Sekber Golkar yang baru, dengan komposisinya sebagai berikut : Ketua : Sokowati

Sekjen

: Kolonel Sapardjo

Anggota

: Mayjen Mas Isman (Kosgoro),

² *Ibid.* hal 30-31.

- : Mayjen Suhardiman (Soksi)
- : Mayjen Sugandhi (MKGR)
- : Brigjen Gatot Sugawijo (Hankam)
- : Brigjen Gondohutomo (profesi dan Intelektual)
- : Mayjen Djamin Gintings (Gakari) gabungan berbagai organisasi pegawai negeri dan pers)
- : Sumiskum (Gerakan pembangun).

Setelah Sekber Golkar direorganisasi, maka yang menjadi pengendaliannya adalah orang-orang Soeharto, baik itu di dalam maupun di luar Hankam. Dengan komposisi pengurus Sekber Golkar yang demikian, berarti dukungan organisasi ini kepada pemerintahan Orde Baru semakin kuat. Akan tetapi hal ini tidak menjadi jaminan bagi Jenderal Suharto.

Jenderal Suharto kemudian membentuk organisasi seperti Front Pancasila, KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), yang tujuannya untuk mendukung Angkatan Darat dan Orde Baru dalam menangani Presiden Soekarno dan para pengikutnya. Runtuhnya rezim Soekarno disertai dengan hilangnya slogan "politik sebagai panglima" yang dicanangkan oleh para pendukungnya, dan munculnya slogan baru "ekonomi sebagai panglima" yang diciptakan oleh

para pembuat pendapat umum yang sebelumnya ditindas oleh rezim tersebut.⁴ Lebih dari itu slogan ini telah melahirkan pandangan yang disebarkan secara meluas dan gencar selama akhir 1965-1966, sebagai alat untuk memberi dukungan pada pimpinan Orde Baru.

Suharto meletakkan masalah ekonomi pada prioritas tinggi setelah dia menjadi ketua kabinet yang efektif pada bulan Maret 1966. Suharto beserta para penasehat ekonomi berusaha menstabilkan harga-harga sesuai dengan pertimbangan mereka, bahwa pemerintah Orde Baru perlu membeli loyalitas masyarakat, dengan cara menginjeksi persediaan barang-barang konsumsi di pasar. Akan tetapi untuk mewujudkan semua itu, bukanlah suatu hal yang gampang. Tapi bagi pemerintah diambil kebijakan dengan mencari bantuan keuangan dari Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara barat lainnya. Namun bantuan dana luar negeri tersebut bukan hanya untuk stabilisasi ekonomi, tapi yang lebih penting adalah untuk membeli dukungan politik.

Memasuki tahun 1967 arus demokrasi yang menuntut agar presiden Soekarno dipecat dan diadili semakin gencar. Tuntutan itu tidak hanya disuarakan oleh kelompok radikal Orde Baru, militer, dan sipil, serta front mahasiswa KAMI, tetapi juga disuarakan oleh wakil-wakil daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten termasuk di Sulawesi-Selatan. Akan tetapi tuntutan-tuntutan ini bersamaan dengan gejala meningkatnya dukungan militer terhadap Sukarno di

⁴ Mohtar Masceod, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, (Jakarta, LP3ES, 1988), hal. 62.

Jawa Timur dan Jawa Tengah.⁵ Sebagai langkah pemerintah untuk mengatasi pertentangan tersebut, maka pada bulan Maret 1967, MPRS bersidang dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden.

Dalam sidang paripurna, kabinet Ampera tanggal 19 April 1967, Suharto menjelaskan bahwa Orde Baru : adalah tatanan seluruh perikehidupan Rakyat, Bangsa dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dilihat dari prosesnya, lahirnya cita-cita mewujudkan Orde Baru itu merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktek-praktek penyelewengan yang telah terjadi pada waktu lampau, lazim disebut zaman Orde Lama. Oleh karena itu, pengertian Orde Baru yang terpenting adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikad baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat, mengabdikan kepada kepentingan nasional yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan sendi UUD 1945.⁶

Suatu masalah baru muncul setelah Soeharto naik menjadi presiden, yakni suhu politik memanas bersamaan ketika kelompok radikal Orde Baru, menolak adanya partai, mereka memandang bahwa kehadiran partai merupakan bagian dari Sistem Orde Lama. Namun, Soeharto menolak ide untuk menghapus sama sekali pengaruh dan eksistensi partai. Ia tidak ingin berkonfrontasi dengan

⁵ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah*, op-cit. hal 188.

⁶ Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan politik di Indonesia (1965-1979)*, (Jakarta Yayasan Idayu, 1983). hal 44.

partai, karena menyadari bahwa, partai-partai itu masih memiliki dukungan massa yang kuat khususnya di daerah pedesaan.⁷

Selain masalah kelompok radikal Orde Baru yang dihadapi pemerintah, muncul suatu permasalahan baru dari kaum Islam, mereka mempermasalahkan tentang peranan Islam. Masalah ini yang banyak dipertentangkan di Sulawesi-Selatan. Sebagai akibat dari permasalahan yang muncul, maka terbentuk suatu kelompok "Sentris". Sesuai dengan pendirian politik kelompok "Sentris" yang melepaskan hubungan dengan kelompok radikal Orde Baru, yang pada mulanya merupakan pendukungnya yang kuat. Kelompok "Sentris" ini juga tidak simpatik atas tuntutan-tuntutan kelompok Islam yang menginginkan dihidupkannya kembali Masyumi yang telah dilarang pada tahun 1961, karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI.⁸ Meskipun mendapat tantangan dari kelompok "Sentris" tapi, akhirnya pemerintah mengizinkan kaum muslim mendirikan Partai Muslim Indonesia (PARMUSI).

Namun tak dapat dipungkiri bahwa di awal pemerintahan Orde baru, Suharto sebagai pejabat presiden dalam Sidang Istimewah (SI) MPRRS 1967, telah mampu menciptakan format politik baru di Indonesia. Keberhasilan Suharto menciptakan format politik baru ini telah memungkinkannya mengembangkan sebuah kekuasaan eksekutif yang relatif efektif guna keperluan membangun Indonesia, yang hasilnya di bidang pembangunan ekonomi merupakan kenyataan-

⁷ *loc-cit.* hal 189.

⁸ *Ibid.* hal 190.

kenyataan keras yang sulit pula untuk di bantah. Antara lain hal ini disebabkan oleh keleluasaan yang sangat besar yang diberikan oleh format politik baru ini kepada Suharto untuk memilih pembantu-pembantu atau menteri-menterinya dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya, kaum teknokrat.⁹

Di Sulawesi Selatan sendiri, pada awal pemerintahan Orde Baru, pemereintah di daerah ini mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan melanjutkan kebijaksanaan yang telah ada sebelumnya sesuai dengan pengarisan-pengarisan yang dituangkan dalam Instruksi Menteri dalam Negeri tanggal 3 juni 1966 Nomor 13 tahun 1966.

Kebijaksanaan yang digariskan, meliputi 3 hal pokok, yaitu:¹⁰

1. Penyempurnaan Pemerintah daerah, yang diarahkan kepada ;
 - penjagaan mental dan semangat aparat dan
 - peningkatan effeciency kerja
2. peningkatan kewaspadaan nasional, utamanya terhadap gerilya politik dan unsur-unsur PKI dan Ormas-ormasnya, dari unsur-unsur Extrim (Extra) lainnya dan dari golongan plin-plan dan pested-interest.
3. Usaha-usaha konsolidasi dan rehabilitasi kehidupan sosial akibat kekacauan-kekacauan yang pernah mencekam daerah ini selama kurang 15 tahun semenjak proklamasi kemerdekaan.

⁹ Rusli Karim, *op-cit.* hal 52-53.

¹⁰ To do puli, *Memori Achmad Lamo*, Gubernur KDH TK.I Sulawesi Selatan, 1966-1978. hal 7.



Semua kebijaksanaan tersebut menjadi pedoman bagi Achmad Lamo selaku Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam bidang Politik dan Pemerintahan.

Achmad Lamo sendiri di angkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 139/1966 tertanggal 11 Mei 1966, yang kemudian di tindaklanjuti dengan Surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 139/ 3/44-1325 yang menunjuk Letkol Achmad lamo sebagai pejabat Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan menggantikan kolonel A.A. Rifai yang diangkat menjadi Anggota DPR-GR/MPRS.¹¹

Sementara Sekber Golkar di Sulawesi di dirikan dalam tahun 1964, oleh beberapa Organisasi-organisasi yang tak jauh beda dengan organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar di pusat, hanya Sulawesi Selatan yang paling berperan dalam pendirian Sekber Golkar adalah Ormas-ormas pemuda.¹²

Adapun yang hadir dalam pembentukan Sekber Golkar di Sulawesi Selatan adalah: Andi Mattalatta, Yasin Limpo, M. Arif Sirajuddin, Soewondo, Mayor Inf.M.R. Salmpessy, R.S. Loegiman, Ali Hasan Acmad, Tadjuddin Calid, M.K. Mangiri B.A., Abdul karim Lawe, Arifin Noor dan yang menjadi ketua

¹¹ Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara (Sul-Selra) Propinsi Sulawesi Selatan, *Arsip Nasional Republik Indonesia (R.I) Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar 1996). hal X.

¹² Yasin Limpo, *Wawancara*, tanggal 17 Juli 2003, di Makassar.

adalah Yasin Limpo.¹³ Mengenai susunan kepengurusan dari Sekber Golkar Sulawesi Selatan, tidak jelas kapan tanggal dan dimana tempat pendeklarasiannya, yang jelasnya nanti pada tahun 1971 baru terbentuk susunan pengurus dari Dewan Pimpinan Sekber Golkar di Sulawesi Selatan

Tidak adanya data mengenai Sekber Golkar di Sulawesi Selatan pada awal pendiriannya, menurut Yasin Limpo disebabkan tidak adanya anggota yang mengarsipkan peristiwa tersebut. Bahkan menurut beliau pendirian Sekber Golkar hanya bertujuan untuk menyatukan Ormas-ormas dan Kino-kino dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan tapi pada perkembangan selanjutnya organisasi ini kemudian menjadi suatu kekuatan politik yang berpengaruh di Sulawesi Selatan.¹⁴

B. Peran Orde Baru Terhadap Golkar di Sulawesi Selatan

Sekber Golkar lahir sebagai organisasi politik yang tidak bernaung dibawah partai politik. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya Sekber Golkar muncul sebagai salah satu kekuatan sosial politik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan sosial politik di Indonesia.

Sekber Golkar mulai menempatkan perannya ketika terjadi G.30 S./PKI. Sekber Golkar bersama Ormas Pemuda yang Pancasila dan militer akhirnya dapat menumpas pemberontakan tersebut secara fisik.

¹³ Yasin Limpo, *Wawancara*, tanggal 17 Juli 2003, di Makassar.

¹⁴ Yasin Limpo, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2003, di Makassar.

Pada perkembangan selanjutnya ketika Orde Baru muncul sebagai pemegang kekuasaan setelah runtuhnya rezim Orde Lama, Sekber Golkar semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pemerintahan Orde baru banyak memberi bantuan kepada usaha pengembangan Sekber Golkar. Peran dari pemerintahan Orde Baru jelas sekali nampak pada saat menjelang pemilihan Umum 1971, berbagai langkah strategi yang ditempuh untuk usaha memenangkan Sekber Golkar dalam pemilihan tersebut.

Sebagai langkah awal dari pemerintah, adalah dengan mengarang pegawai negeri, maka menteri dalam negeri Amir Machmud mengeluarkan peraturan menteri No. 12 tahun 1969 yang terkenal dengan sebutan akronim permen 12¹⁵. Isi dari permen 12 tersebut adalah bahwa anggota-anggota departemen hanya boleh memberikan loyalitas kepada negara dan bangsa bahkan jika perlu melarang warga departemen untuk masuk partai.

Peremen 12 ini mendapat reaksi dan protes dari berbagai kalangan terutama tokoh-tokoh partai politik, akan tetapi oleh pemerintah ditanggapi lain, justru permen 12 tersebut kemudian disusul oleh surat edaran menteri dalam negeri yang berisikan formulir tentang Korps Karyawan Pemerintah dalam Negeri (Kokarmendagri). Isi dari kokarmendagri adalah agar pegawai negeri

¹⁵ Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik, Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Seri Prisma, 1992), hal 194.

menanggalkan keanggotaan kepartaian atau keormasannya dan menjadi anggota kokamendagri."¹⁶

Setelah mengarap pegawai negeri maka langkah selanjutnya adalah mengarap massa Islam, maka pemerintahan Orde Baru kemudian menghidupkan kembali Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) sebagai saingan bagi majelis ulama.

Disaat para pemikir Sekber Golkar berusaha keras menarik dukungan dari pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dimana-mana melalui kokamendagri dan GUPPI, pihak militer terus melakukan tekanan-tekanan langsung terhadap para pemilih khususnya di desa-desa."¹⁷

Sementara di Sulawesi Selatan strategi yang di gunakan pemerintah di daerah ini lebih dikenal dengan nama taktik Steamroller dan Bulldozer yakni dengan penggunaan imbalan-imbalan materi yang disalurkan melalui jaringan-jaringan patronclient dengan tujuan demi kemenangan Golkar."¹⁸

Dalam pelaksanaan taktik ini, pemerintahan kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan memperoleh dana dari pemerintah pusat, baik secara formal melalui proyek-proyek pembangunan maupun secara informal melalui dana-dana taktis khusus yang tersedia untuk Golkar. Dana-dana informal biasanya di sesuaikan dengan aktivitas-aktivitas kampanye Golkar.

¹⁶ *Ibid.* hal 195.

¹⁷ *loc-cit.* hal 195.

¹⁸ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah, op-cit.* hal 280.

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat terhadap usaha Golkar di Sulawesi Selatan untuk menang dalam pemilihan umum 1971, maka pada akhir tahun 1970, menteri dalam negeri Amir Mahmud mengunjungi Makassar dan ia menyumbang Rp 2 juta untuk merenovasi mesjid Agung, ini sebagai langkah untuk menarik simpati masyarakat setempat khususnya ummad Islam. Bukan cuma sampai disitu langkah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ketika menjelang pemilihan umum 1971 presiden Suharto kemudian menyumbang sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan Pesantren di Ujung Pandang yang dikelola oleh organisasi Islam yang berafiliasi dengan Golkar GUPPI.¹⁹

Nampaknya bantuan dari pemerintah pusat terhadap Sulawesi Selatan itu membawa pengaruh positif terhadap pemerintahan Orde Baru dan usaha Golkar dalam mencari dukungan dari masyarakat. Bantuan tersebut meningkatkan daya asosiasi masyarakat bahwa pembangunan itu sama dengan Golkar. Dengan kondisi seperti itu maka Golkar Sulawesi Selatan akan mendapat dukungan dari semua kalangan masyarakat di daerah ini.

Semua jenis upaya dari pemerintahan Orde Baru untuk memenangkan Golkar dalam pemilihan Umum 1971 membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Di tingkat Nasional Golkar memperoleh 34.348.673 (62,8%) suara, sedangkan khusus untuk Sulawesi Selatan Golkar memperoleh 1.938.280 (78,3%) suara.

Dari hasil perolehan suara pada pemilihan umum 1971 khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, jelas bahwa Golkar di daerah ini telah mendapat

¹⁹ *Ibid.* hal 282.

dukungan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat, buktinya sebagai organisasi politik yang baru pertama kali ikut dalam pemilu, Golkar mampu mengungguli partai-partai politik dalam perolehan suara. Sungguh diluar dugaan Golkar yang merupakan organisasi politik yang baru di Sulawesi Selatan tapi organisasi ini mampu menarik massa partai politik. Kondisi ini yang menyebabkan pertubuhan dan perkembangan partai politik di daerah ini mengalami kemerosotan hingga akhirnya dilakukan penyederhanaan partai politik pada tahun 1973.

Dengan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum 1971, jelas akan memantapkan pemerintahan Orde Baru. Di DPRD Sulawesi Selatan sendiri setelah pemilihan umum 1971, komposisinya di dominasi oleh orang-orang Golkar dan ini menandakan bahwa Golkar akan berperan penting dalam pengambilan kebijakan.

Hubungan antara Golkar dengan pemerintahan Orde Baru merupakan hubungan saling dukung mendukung, disatu sisi Golkar merupakan sarana politik pemerintahan Orde Baru, tapi pada sisi lain Orde Baru membantu dalam pengembangan Golkar.

Dari hubungan saling dukung-mendukung antara Golkar dengan pemerintahan Orde Baru, bagi partai politik merupakan suatu masalah yang akan mengancam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan tumbuh dan berkembang Golkar di Sulawesi Selatan maka partai politik di daerah ini akan kehilangan basis massanya. Banyaknya basis massa partai politik yang beralih ke Golkar merupakan salah satu paktor keterpurukan partai politik di era Orde Baru.

Dibalik keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam memenangkan Golkar pada pemilihan umum 1971 di Sulawesi Selatan, ternyata disisi lain muncul kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Kelompok ini sangat berperan penting dalam menumbangkan rezim Orde Lama khususnya di Sulawesi Selatan.

C. Politik di Sulawesi Selatan dan runtuhnya Rezim Orde Lama: Peran Masyarakat Sulawesi Selatan dalam kehidupan politik di Indonesia

Pada awal runtuhnya Orde Lama dan lahirnya pemerintahan Orde Baru membawa pengaruh ke daerah-daerah termasuk Sulawesi-Selatan. Ketika kampanye untuk menjatuhkan Soekarno semakin marak, maka masyarakat Sulawesi-Selatan juga ambil peran untuk menumbangkan rezim Orde Lama. Di daerah ini, kampanye dilakukan dengan nada tinggi. Kelompok Islam seperti KAMI, KAPPI, NU, dan organisasi Islam lainnya meningkatkan emosi permusuhan terhadap pendukung Soekarno yang sudah melemah. Tidak sampai disitu saja, bahkan para ulama Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyampaikan instruksi kepada semua anggota Muhammadiyah dan orang Islam pada umumnya untuk membaca qunut Nasilah selama satu kali dalam setiap do'a mereka.²⁰

Setelah Presiden Soekarno jatuh pada bulan Maret 1967, maka kampanye-kampanye di Sulawesi Selatan berakhir. Namun demikian, kelompok-kelompok yang telah mendorong pencabutan secara radikal pengaruh Soekarno tetap aktif.

²⁰ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah op-cit.* hal 209.

Kondisi ini merefleksikan respon Sulawesi Selatan terhadap kecenderungan pemerintah Orde Baru dalam mengurangi pengaruh kelompok-kelompok Islam. Pada bulan Desember 1966 panglima-panglima Kodam (Angkatan Darat) mengeluarkan pernyataan bersama yang menentang usul rehabilitasi Masyumi yang telah dilarang sejak tahun 1961.²¹ Akibat tak dilakukan rehabilitasi Masyumi, maka banyak kalangan Islam memandang bahwa jabatan tinggi pemerintahan Orde Baru, lebih terbuka bagi orang Kristen dari pada orang Islam. Selain itu politik luar negeri Indonesia lebih cenderung mengikuti kepentingan negara-negara Barat daripada negara-negara Arab dalam konflik Timur Tengah.

Sikap pemerintah pusat yang kurang merespon tuntutan kelompok Islam dan politik luar negeri yang cenderung ke Barat menjadi latar belakang peristiwa besar di Makassar pada tanggal 1 Oktober 1967, ketika sekitar 21 gereja dan berapa fasilitas keagamaan Kristen lainnya dirusak oleh para demonstran kelompok Islam.²² Tindakan pengrusakan ini merupakan peristiwa penting, karena bertepatan dengan hari yang menjadi symbol kemenangan kekuatan anti komunis atas "penghianatan PKI" yang dikenal sebagai hari kesaktian Pancasila. Menurut salah satu sumber bahwa peristiwa itu ada hubungannya dengan

²¹ *loc-cit.* hal 209.

²² *Ibid.* hal 210.



keinginan tokoh-tokoh militer Sulawesi Selatan untuk menggantikan posisi Jenderal Yusuf, yang berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet.²³

Kerusuhan ini harus juga dilihat dalam hubungannya dengan kekecewaan total tokoh Islam yang merasa disisihkan. Kerusuhan itu juga merupakan ajang unjuk kekuatan yang dilakukan kelompok Islam radikal, baik dari luar maupun dalam wilayah Sulawesi Selatan. Tindakan ini mempunyai tujuan khusus yakni mendesak pemerintah agar membatalkan izin bagi Dewan Gereja Indonesia yang akan mengadakan sidang tiga tahunannya di Makassar pada akhir Oktober. Akan tetapi sidang itu tetap diselenggarakan di Makassar tanpa ada gangguan apapun. Hal ini semua berkat peranan Jenderal Yusuf yang diberi tugas khusus untuk mengamankan sidang itu.²⁴

Tindakan Jenderal Yusuf mungkin mendorong orang-orang Sulawesi Selatan untuk melakukan taktik tekanan-tekanan yang bermaksud memperkuat posisinya dalam perpolitikan nasional. Pada sisi yang lain, ia berkeinginan untuk membantu presiden Soeharto untuk memperkuat otoritas pemerintah pusat di Makassar. Dengan adanya peristiwa kerusuhan tersebut, maka proses akomodasi terhadap Orde Baru di Sulawesi Selatan tidak berjalan mulus. Peristiwa itu yang menjadi dasar sehingga Sulawesi Selatan menjadi konteks politik nasional di bulan Oktober 1967. Konteks ini adalah antara Islam dan Kristen.

²³ *loc-cit.*, hal 210.

²⁴ *Ibid.*, hal 212.

Nampaknya tuntutan untuk menumbangkan rezim Orde Lama mulai menampakkan hasil, ketika Sukarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1967 kepada Suharto. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan untuk menumbangkan rezim Orde lama, maka MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewah pada tanggal 7-12 maret 1967, mereka memutuskan untuk menghilangkan dualisme dalam kepemimpinan nasional dan pemerintah, sekaligus mencabut kekuasaan pemerintahan Negara dari Ir Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Jelas bahwa proses peralihan pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru di Sulawesi Selatan merupakan proses yang melibatkan semua unsur masyarakat, baik itu pemerintah, kaum militer, maupun organisasi-organisasi politik. Pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lain yang akhirnya menimbulkan kekacauan sangat mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan sosial politik di daerah ini.

BAB IV
GOLONGAN KARYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK DI
SULAWESI SELATAN
(1971 - 1973)

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Partai politik : *Munculnya Militer dalam politik di Sulawesi Selatan.*

Sejak awal kemerdekaan 17 Agustus 1945, hingga memasuki tahun 1965, pertumbuhan dan perkembangan partai politik di Sulawesi Selatan sangat di pengaruhi oleh stabilitas keamanan di daerah ini.

Pada tahun 1955 jumlah partai politik yang ada di Sulawesi Selatan meliputi 7 bagian wilayah yakni: Makassar, Kota Makassar, Bonthain, Mandar, Bone, pare-pare, dan Luwu. Adapun nama dan tempat perkembangan partai politik di Sulawesi Selatan berdasarkan agama dan kebangsaan serta berdasarkan Marzisme adalah sebagai berikut :³

1. Kota Makassar

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Dewan Masyumi | - Partai Syarekat Islam (PSII) |
| - Partai kristen Indonesia (Parkindo) | - Partai Katholik |
| - Nahdatul Ulama (NU) | - Partai Nasional Indonesia (PNI) |
| - Partai Indonesia Raya (PIR) Wongso | - Partai Indonesia Raya (PIR) Hazairin |
| - Parindra | - Partai Rakyat Indonesia (PRI) |
| - Partai Rakyat Nasional (PRN) | - Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) |

³ Arsip Propinsi Sulawesi Selatan, *Peta dan Daftar Partai-partai Politik yang berdasarkan Agama Kebangsaan dan Marzisme*, (Propinsi Sulawesi Selatan, 1955). No.Reg. 237. Kode Dos 27.

- Lembaga Indonesia Maluku (LIM)
- Partai Federal Indonesia (PFI)
- Lembaga Indonesia Maluku Sulawesi Selatan (LISS)
- Badan Pemasarakatan Kewarganegaraan Indonesia

2. Makassar meliputi:

a. Sungguminasa

- Masyumi
- Partai Sarekat Islam indonesia (PSII)
- Partai Rakyat Indonesia (PRI)
- Partai Komunis Indonesia (PKI)
- Partai Indonesia Raya (PIR)
- Partai Buruh
- Partai Rakyat Nasional (PRN)
- Partai Sosialis Indonesia (PSI)

b. Jene Ponto

- Masyumi
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

c. Sigeri

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

d. Limbung

- Partai srekat Islam Indonesia (PSII)

e. Galesong

- Partai Srekat Islam Indonesia (PSII)

f. Malino

- Partai kerdaulatan Rakyat (PKR)

g. Allu

- Partai Kedaulatan Rakyat

h. Arung Keke

- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

i. Taruang

- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

J. Labakkang

- Partai Indonesia Raya (PIR)

3. Bonthain

a. Bonthain

- Masyumi - Partai Rakyat Nasional (PRN)
- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Nahdatul Ulama (NU)
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) - Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Partai Rakyat Indonesia (PRI) - Partai Komunis Indonesia (PKI)

b. Bulukumba

- Masyumi - Partai Indonesia Raya (PIR)
- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Nahdatul Ulama (NU)
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

c. Benteng

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Masyumi
- Partai Nasional Indonesia (PNI) - Partai Indonesia Raya (PIR)
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) - Partai Komunis Indonesia (PKI)

d. Sinjai

- Masyumi
- Partai Indonesias Raya (PIR)
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

4. Mandar

a. Majene

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Masyumi
- Partai Indonesia Raya (PIR) - Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Pergerakan Tarbiyah Islamiah (Perti)

b. Polewali

- Masyumi - Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) - Nahdatul Ulama (NU)

c. Mappili

- Pergerakan Tarbiyah Islamiah (Perti)

d. Tinambung

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
- Masyumi

e. Mamuju

- Masyumi

f. Tappalang

- Masyumi

g. Budong-budong

- Masyumi

h. Sampaga

- Masyumi

i. Luwu

- Masyumi

j. Karoso

- Masyumi

k. Mamasa

- Masyumi - Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) - Parkindo

5. Bone

a. Watampone

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Partai Kedaulatan rakyat (PKR) - Partai Indonesia Raya (PIR)
- Nahdatul Ulama (NU) - Partai Rakyat Nasional (PRN)

b. Sengkang

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Masyumi
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) - Partai Indonesia Raya (PIR)

c. Watan Soppeng

- Partai Kristen Indonesia (Parkindo) - Masyumi
- Partai Nasional Indonesia (PNI) - Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

6. Pare-Pare

a. Pare

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Nahdatul Ulama (NU)
- Partai Nasional Indonesia (PNI) - Partai Rakyat Nasional (PRN)
- Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

b. Rappang

- Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Masyumi

c. Pinrang

- Partai Nasional Indonesia (PNI)

d. Sumpang BinggangaE

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

e. Pangkajene Sidenreng

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

f. Tanette

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
- Partai Sosialis Indonesia (PSI)
- Partai Komunis Indonesia (PKI)

7. Luwu

a. Polopo

- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) - Masyumi
- Partaikindo - Partai Nasional Indonesia (PNI)



- Partai Indonesia Raya (PIR)
 - Partai Rakyat Nasional (PRN)
 - Partai Rakyat Indonesia (PRI)
 - Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
 - Partai Sosialis Indonesia (PSI)
 - Partai Komunis Indonesia (PKI)
- b. Lamasi
- Partai Rakyat Nasional (PRN)
- c. Makale
- Masyumi
 - Partai Sosialis Indonesia (PSI)
- d. Rantepao
- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
 - Parkindo
 - Partai Komunis Indonesia (PKI)
 - Partai Katolik
- e. Malili
- Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
 - Partai Nasional Indonesia (PNI)
- f. Bone-Bone
- Partai Rakyat Nasional (PRN)
 - Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
 - Parkindo

Dari sekian banyaknya partai politik dalam tahun 1955, di Sulawesi Selatan hanya beberapa saja partai politik yang mampu bersaing dalam pemilihan umum 1955. Partai yang memperoleh suara mayoritas pada pemilihan umum 1955 adalah :

Partai Nasionam Indonesia	:30289 suara (3,3%)
Masyumi	:364343 suara (39,7%)
Nahdatul Ulama	:158094 suara (17,2%)
Partai Komuni Indonesia	:117524 suara (1,9%)
Parkindo	:117747 suara (12,8%)
Partai Sarekat Islam Indonesia	:112592 suara (12,3%)

Berdasarkan hasil perolehan suara, jelas bahwa partai yang kuat di Sulawesi Selatan pada saat itu adalah partai-partai yang berbasiskan Islam seperti Masyumi, PSII, NU.

Seperti disinggung pada bab sebelumnya bahwa keberhasilan Masyumi dalam pemilihan umum 1955 berkaitan dengan otoritas tokoh-tokoh aristokrat. Para tokoh aristokrat tertarik pada Masyumi karena beberapa faktor yakni :²

- Karena Masyumi merupakan partai yang kuat secara nasional
- Karena mereka menganggap Masyumi sebagai partai yang mampu dan mau melindungi posisi mereka sebagai penguasa dan pemimpin daerah
- Mereka memandang Masyumi sebagai salah satu sarana untuk melindungi identitas etnis Sulawesi Selatan dalam menghadapi orang-orang Jawa dan Manado yang memegang peran utama di daerah ini.

Pertumbuhan dan perkembangan partai politik di Sulawesi Selatan mengalami penurunan khususnya Masyumi pada tahun 1958, ketika militer

² Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah, Kasus Sumatra dan Sulawesi Selatan 1943-1979*, (Yogyakarta, Pusat antar universitas, study sosial, UGM), hal 166-167.

muncul sebagai partner dan melakukan kerja sama dengan para aristokrat yang mulanya merupakan pendukung Masyumi.

Hubungan antara kaum militer dengan para tokoh aristokrat mampu menciptakan suatu proses lokalisasi atau Buginisasi dan Makassarisasi.³ Adanya hubungan antara kaum militer dengan para aristokrat tersebut telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial politik di daerah ini. Hubungan itu telah membawa perubahan dalam pemerintahan baik itu sipil maupun militer.

Orang-orang yang ada di pemerintahan sipil dan militer setelah adanya hubungan antara militer dengan para aristokrat adalah putra-putra daerah mampu menduduki posisi penting baik dalam pemerintahan sipil maupun militer. Kondisi seperti ini menandakan bahwa kaum militer di Sulawesi Selatan memainkan peran-peran penting dalam kehidupan sosial politik di daerah ini.

Peran militer semakin kuat ketika Andi Rivai diangkat menjadi Gubernur pada tahun 1965 yang kemudian di ganti oleh kolonel Achmad Lamo . ketika Amir Yusuf diangkat sebagai Komando Kodam Hasanuddin menggantikan Andi Mattalatta maka peran militer di Sulawesi Selatan semakin kuat. Amir Yusuf dipandang sebagai sosok yang berani dalam bertindak. Di saat suhu politik di Jakarta semakin memanas yang menyebabkan muncul tiga kekuatan politik yakni : Kekuatan Sukarno, Kekuatan Angkatan darat (AD) dan kekuatan partai politik. Amir Yusuf justru beraliansi dengan pihak eksekutif baik untuk melakukan posisi

³ *loc-cit.* hal 167.

tawar menawar dengan Jakarta maupun menyelesaikan masalah –masalah internal Sulawesi selatan.”⁴

Keberanian Amir Yusuf dalam bertindak kembali dibuktikan ketika birokrasi partai politik dan ormas-ormas, hampir keseluruhannya di bawah kendali Kodam XIV Hasanuddin, Ia melarang semua aktifitas PKI dalam wilayah yuridisnya. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi Sulawesi selatan dari pengaruh ideologi komunis dan yang terpenting adalah untuk melunakkan Kahar Muzakkar yang masih setia dengan DI/TII-nya.⁵ Akan tetapi larang tersebut kemudian Ia cabut akibat tekanan dari Presiden Sukarno, akan tetapi dalam kenyataannya Amir Yusuf tetap membatasi gerakan PKI di daerah ini.

B. Golongan Karya Sebagai Salah Satu Kekuatan Sosial Politik di Sulawesi Selatan

Lahirnya Golkar sebagai salah satu kekuatan sosial politik di Indonesia, pada hakekatnya karena tujuan perjuangan. Adapun tujuan dan cita-cita Golkar terdiri dari 10 pokok, yaitu :⁶

1. Mempertahankan tegaknya Negara Proklamasi R.I. 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Membina rakyat berkesadaran Hukum dan Demokrasi.

⁴ Abd. Latif, *Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan*, dalam Edward L. Poelinggomang and Suriadi Mappangara, *Dunia militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi selatan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1998). hal 256.

⁵ *Ioc-cit*. hal 256.

⁶ Arsip pribadi, Saleh Lahade, *Penyataan Program Perjuangan Golongan karya*, No. Reg. 453. hal 3.

3. Memperjuangkan terlaksananya pembaharuan struktur politik dengan menggantikan orientasi perjuangan pada ideologi golongan menjadi orientasi perjuangan pada program pembangunan, demi kesejahteraan rakyat.
4. Mengusahakan terciptanya suatu pemerintahan yang kuat dan bersih serta aparatur yang cakap, loyal dan penuh pengabdian, baik di pusat maupun di daerah.
5. Menerima dan memperkokoh peran ABRI sebagai pengaman dan pemersatu Negara dan Bangsa, dan sebagai dinamisator serta stabilisator dalam bidang-bidang IPOLEKSOSBUD.
6. Mempertahankan politik luar negeri yang bebas-aktif dan mengembangkan kerjasama antar Bangsa demi perdamaian dunia, atas dasar saling hormat - menghormati.
7. Mendukung pemerintah dan mensukseskan PELITA.
8. Menunjang pengembangan modal usahawan pribumi.
9. Mengarahkan modal asing untuk kesejahteraan rakyat.
10. Mendorong modernisasi desa, meningkatkan produksi serta mensukseskan transmigrasi dan keluarga berencana.

Dengan Keputusan Presiden No. 193 tahun 1964 yang menghendaki supaya golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada partai-partai politik, utamanya PKI, adalah merupakan suatu landasan untuk mempertahankan golongan-golongan fungsional yang terpencar-pencar itu.

Dengan lahirnya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) ini menandakan bahwa kekuatan-kekuatan dari golongan-golongan fungsional sudah dapat di persatukan dalam suatu bentuk perjuangan. Meletusnya G.30.S/PKI menandakan terjadinya peristiwa yang dicetuskan PKI untuk merebut kekuasaan pemerintahan Indonesia dan sekaligus untuk menguasai golongan-golongan fungsional.⁷ Akan tetapi gerakan ini dapat digagalkan oleh angkatan bersenjata dan rakyat Indonesia, dan pada kesempatan ini dimanfaatkan oleh golongan-golongan fungsional untuk lebih memperlihatkan ide-ide politiknya yaitu menegakkan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dari perjuangan dan ide-idenya itu maka pada perkembangan selanjutnya Sekber Golkar yang tidak lain adalah golongan fungsional bersama dengan ABRI dan kekuatan-kekuatan politik lainnya mengusahakan pembaharuan politik di Indonesia. Dukungan ABRI terhadap Golkar secara timbal balik disebabkan oleh perjuangan ABRI dalam bentuk dwifungsi ABRI.

Sementara di Sulawesi Selatan, Golkar sebagai salah satu kekuatan sosial politik di daerah ini telah mampu melakukan hubungan timbal balik dengan kaum militer dan pemerintahan setempat. Dalam usaha memenangkan pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh Golkar, maka pemerintah Orde Baru telah mengambil langkah-langka strategi dalam usaha tersebut.

⁷ Tinambak, *Golongan Karya Sebagai Salah Satu Kekuatan Sosial Politik di Kota Madya Ujung Pandang*, (Ujung Pandang, Program ilmu-ilmu sosial dan sastra bidang sosial politik Unhes, 1981), hal 19.

Di Sulawesi Selatan, peran pemerintah dan kaum militer jelas nampak sekali. Ahmad Lamo yang telah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan sejak tahun 1967 menggantikan Andi Rivai menjadi penguasa tunggal di daerah ini pada tahun 1969. Perubahan hak kuasa Gubernur merupakan refleksi dari kebijaksanaan pemerintah Orde Baru untuk memindahkan kekuasaan dari panglima-panglima militer dan menjadikan Gubernur sebagai pemegang kunci.⁸ Dalam usaha memenangkan Golkar di daerah Sulawesi Selatan, maka Gubernur Ahmad Lamo menggunakan taktik penggunaan imbalan-imbalan materi yang disalurkan melalui jaringan-jaringan patron-client.⁹

Dana-dana dalam usaha ini disediakan oleh pemerintah pusat, baik secara formal melalui proyek-proyek pembangunan maupun secara informal melalui dana-dana taktis khusus yang tersedia untuk Golkar.¹⁰ Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 di Sulawesi Selatan menandakan keberhasilan pemerintah setempat. Dengan memperoleh 78,2 persen dari jumlah keseluruhan suara di daerah ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, menunjukkan bahwa Golkar sebagai partai baru di daerah ini telah mampu bersaing dengan partai politik lain seperti NU, PSII, Perti, dan Parmusi yang telah ada sebelumnya.¹¹

Berdasarkan hasil Pemilu 1971, maka komposisi anggota DPRD tingkat I Sulawesi Selatan mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi pada komposisi

⁸ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah, op-cit.* hal 270.

⁹ *Ibid.* hal 280.

¹⁰ *loc-cit.* hal 280.

¹¹ Lihat, *tabel hasil pemilu 1971 sampai 1982 pada bagian lampiran, V.*

keanggotaan yang di dominasi oleh anggota dari fraksi Golkar sebagai pemenang dalam pemilihan umum. Posisi ketua diduduki oleh Kolonel A.R. Mandji¹² yang pada waktu itu juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar tingkat I Sulawesi Selatan. Selain itu pembagian kursi untuk anggota DPRD Sulawesi Selatan juga terjadi perubahan yang menyolok, yakni jumlah kursi untuk partai berkurang menjadi 7 dan 6 kursi yang disediakan untuk anggota-anggota dari ABRI, sedangkan selebihnya semuanya dari Golkar. Dengan komposisi anggota DPRD Sulawesi Selatan yang didominasi oleh Golkar, maka dalam pengambilan keputusan pada setiap kebijakan yang akan diambil untuk kelangsungan roda pemerintahan di Sulawesi Selatan, peran Golkar sudah mulai nampak dalam kehidupan sosial politik di daerah ini. Pertumbuhan dan perkembangan Golkar di Sulawesi Selatan mengalami kemajuan yang pesat, semua ini tidak lepas dari peran dari pemerintahan Orde Baru dan kaum militer.

C. Golongan Karya Setelah Pemilihan Umum 1971 di Sulawesi Selatan: Persaingan Politik Dikalangan Militer.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada pemilu 1971 Sekber Golkar menang mutlak atas saingan-saingan politiknya baik ditingkat nasional maupun ditingkat I dan II di seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat Nasional, Sekber Golkar meraih 62,8 persen suara dengan memperoleh 227 kursi, sementara partai lain seperti NU hanya memperoleh 18 persen suara dan mendapat 58 kursi, sedangkan PNI memperoleh 6,93 persen suara dan mendapat 20 kursi.

¹² lihat, *Riwayat Hidup, A.R. Mandji*, pada lampiran VI.

Sementara untuk tingkat I, khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan, Sekber Golkar menang dengan memperoleh 78,2 persen suara dari jumlah keseluruhan suara yang ada didaerah ini, sedangkan partai lain seperti NU, PSII, Perti, dan Parmusi hanya memperoleh 18,8 persen suara.¹³

Setelah Sekber Golkar menang pada Pemilu 1971, maka oleh pengurus Sekber Golkar dipandang telah waktunya mengadakan konsolidasi lebih lanjut dengan memantapkan organisasi baik di pusat maupun di daerah termasuk Sekber Golkar yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, maka pengurus Sekber Golkar Pusat menyelenggarakan musyawarah di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1971. Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh Sekber Golkar, mereka yang hadir antara lain : Mayjen S. Sokowati, Ali Moertopo, Kolonel Moedjono SH, Martono, Kolonel Malikus, Suparto, Drs. Sumiskum, Cosmos Batu Bara, dan David Napitulu. Musyawarah itu bertujuan untuk merancang perubahan bentuk organisasi, dari bentuk federasi ke bentuk kesatuan dan merancang Persiapan Munas I Sekber Golkar tahun 1973.

Dalam musyawarah itu disepakati lima keputusan yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan ketua umum Sekber Golkar No: Keputusan / 101 / VII Golkar / 1971, tanggal 17 Agustus 1971, yang isinya sebagai berikut :¹⁴

1. Nama Sekber Golkar diganti menjadi Golkar.
2. Struktur organisasi terdiri dari pusat tingkat I dan daerah tingkat II.

¹³ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah*, *Ibid.* hal 282.

¹⁴ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal 17.



3. Istilah KINO tidak digunakan lagi.
4. Ormas-ormas yang terhimpun dalam KINO diserahkan pembinaannya dan pengendalian politiknya kepada Golkar, karena KINO tidak lagi menjadi badan-badan pelaksana perjuangan politik. Keputusan itu menjelaskan bahwa, terjadinya peleburan KINO-KINO yang membuat Golkar menjadi organisasi yang bersifat kesatuan, tetapi kenyataannya masih tetap organisasi perorangan.

Setelah reorganisasi Sekber Golkar di tingkat pusat, maka Sekber Golkar di tingkat propinsi dan kabupaten juga mengalami konsolidasi. Menurut informasi yang tersedia pada tingkat propinsi, tampaknya semua ketua panitia daerah Sekber Golkar terdiri dari para Kolonel dan Mayor, sebagian sekjennya adalah juga orang-orang militer.¹⁵

Di Sulawesi Selatan yang menjadi ketua DPD Golkar tingkat I adalah kolonel A.R. Manji. Adapun susunan Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I Sulawesi Selatan berdasarkan keputusan No. KEP. 3001 / XII / Golkar / 1971, tanggal 2 Desember 1971 sebagai berikut:¹⁶

Ketua	: A.R. Manji.
Wakil ketu	: Soewondho.
Anggota	: Drs. M. Parawangsa
	: DR. R. Tandi Rerung.

¹⁵ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer*, op-cit. hal 33-34.

¹⁶ DPD Golkar, Propinsi Sulawesi Selatan. *Lihsat, susunan pengurus DPD Golkar Tingkat I Sulawesi Selatan Periode 1971-2003*, pada bagian lampiran III.

Sekretaris	: Ali Hasan Acmad.
Wakil sekretaris	: M. Arif Sirajuddin.
	: Drs. Hisjam Ichsan.
<u>Asisten Sekretaris:</u>	
Bidang Peg. Negeri dan tenaga kerja	: MK. Mangiri B.A.
Bidang Budaya dan Spritual	: R.S. Loegiman.
Bidang ekonomi dan produksi	: Drs. Arifin Noor.
Bidang Hankam	: Mayor Inf. M.R. Salampessy.
Bidang pemuda, Cendekiawan dan Wanita	: DR. Tadjuddin Chalid .

AR. Mandji sebagai ketua umum Golkar di Sulawesi Selatan, juga menjabat sebagai ketua DPRD tingkat I Sulawesi Selatan, sangat berperan dalam pengangkatan Ahmad Lamo sebagai Gubernur untuk periode kedua. Dalam pencalonan Ahmad Lamo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan nampak campur tangan dari pemerintah pusat. Situasi ini jelas ketika Ali Moertopo melakukan kunjungan ke Makassar untuk bertemu dengan panglima Kodam, Brigadir Jenderal Azis Bustam,¹⁷ dan ketua Golkar yang juga ketua DPRD tingkat I Sulawesi Selatan, Kolonel A.R. Mandji.

¹⁷ Lihat, *Riwayat Hidup, Brigadir Jenderal Azis Bustam*, pada daftar nama-nama Pangdam di Sulawesi Selatan. Lampiran I.

Dalam pertemuan itu, Ali Moertopo menjelaskan bahwa presiden Soeharto mengiginkan agar Ahmad Lamo dipilih kembali.¹⁸ Sebagai tindak lanjut, maka pada awal bulan November 1972 A.R. Mandji berangkat ke Jakarta dan ketika dia kembali ke Makassar dijelaskan kepada anggota-anggota DPRD yang lain, bahwa Hankam telah memberikan restunya kepada Ahmad Lamo. Selang waktu beberapa hari yakni pada pertengahan bulan November 1972, partai-partai dan Golkar dalam DPRD tingkat I Sulawesi Selatan menunjuk Ahmad Lamo sebagai calon tunggal untuk jabatan Gubernur dengan pertimbangan bahwa " dia cukup baik dan jujur " .¹⁹

Pengangkatan kembali Ahmad Lamo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan menimbulkan konflik di Jakarta. Kelompok Ahmad Lamo mempunyai hubungan dengan paksi Opsus atau Aspri (Asisten pribadi), dan pengecampengecampunya didukung oleh paksi Hankam. Selain itu konflik ini juga merupakan suatu refleksi persaingan pribadi dan kelompok dalam elit Sulawesi Selatan, suatu kelompok elit yang sebagian besar terdiri dari tokoh-tokoh militer dan eks militer angkatan 1945.²⁰

Dalam kondisi politik yang tidak stabil di Sulawesi Selatan, maka oleh pemerintah dipandang perlu untuk membentuk Cors Hasanuddin (Corhas) di daerah ini. Badan ini di bentuk pada tanggal 20 Januari 1969 yang merupakan titik awal dari pembentukan badan-badan yang serupa pada divisi-divisi (kodam)

¹⁸ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah*, Ibid. hal 286.

¹⁹ *loc-cit.* hal 286.

²⁰ *Ibid.* hal 287.

militer di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keanggotaan dari badan ini, terdiri dari tokoh-tokoh militer Sulawesi Selatan di Kodam dan tokoh militer lain yang sudah pensiun atau sudah bebas tugas. Para anggota Corhas ini bertugas untuk mengatur alokasi posisi-posisi politik yang strategis di antara anggota-anggotanya.

Antara Corhas dengan Kodam memiliki hubungan yang sangat erat, seperti apa yang dikatakan oleh Sekretaris Jendral Corhas Andi Sapada, yakni "loro-loroning atunggal". Menurutnya "bila Golkar adalah kekuatan politik yang dirancang secara vertikal dari pusat ke daerah-daerah, Corhas adalah kekuatan moral dan ekonomi di daerah tersebut."²¹ Sebagai bentuk peran dari Corhas dalam bidang ekonomi adalah dibentuknya Yayasan Lontara, yakni suatu lembaga yang bertugas untuk menyediakan kesempatan-kesempatan bisnis bagi anggota-anggotanya.

Tugas utama dari pembentukan Corhas ini adalah untuk mengatur hubungan antara kedua kelompok utama yang terdapat di Sulawesi selatan. Kelompok pertama terdiri dari tokoh-tokoh militer asli Sulawesi Selatan yang berdinasti dalam kemiliteran di Jawa dan kembali ke daerah ini dalam suatu "ekspedisi" di masa revolusi. Kelompok yang kedua merupakan golongan yang mengadakan perang gerilya menghadapi Belanda di daerah Sulawesi Selatan sejak awal. Mereka yang termasuk dalam kelompok pertama antara lain Andi Sapada, Andi Rivai, Abdul Latief, Ahmad Lamo dan A.R. Manji, yang kesemuanya ini telah menduduki posisi-posisi penting di DPRD, Golkar, Kantor

²¹ *Ibid.* hal 287-288.

Gubernur dan perusahaan-perusahaan bisnis di Ujung Pandang. Sementara mereka yang tergabung dalam kelompok yang kedua adalah tokoh-tokoh masyarakat yang telah membangun jaringan patron-clien yang luas di daerah-daerah pedesaan, mereka mendapat posisi sebagai bupati dan camat.²²

Perpecahan dikalangan elit politik Sulawesi Selatan nampaknya terus berlanjut, ini terbukti ketika terjadi protes mahasiswa yang berskala besar di Jawa. Ternyata di Ujung Pandang pada bulan Desember 1973 dan Januari 1974 dipenuhi oleh protes-protes dan pernyataan-pernyataan serta memorandum-memorandum mahasiswa dan pemuda. Mereka menuduh pejabat-pejabat daerah "membayar upeti kepada atasan-atasan mereka" dan "mereka sendiri bersenang-senang sementara banyak masyarakat yang menderita."²⁴ Aksi-aksi tersebut berada ditangan-tangan kelompok organisasi keagamaan dan mempunyai latar belakang multi etnis, termasuk orang-orang Kristen Toraja dan orang-orang Islam Ambon serta Sulawesi selatan. Gerakan mereka mendapat dukungan dari mahasiswa Universitas Hasanuddin dan elemen-elemen pers di Ujung pandang. Akan tetapi gerakan ini runtuh dengan cepat setelah terjadi penangkapan dan kutukan atas aktivitas-aktivitas kerusuhan di Jakarta pada pertengahan Januari 1974.

Pergolakan dalam kalangan elit politik Sulawesi Selatan terus berlanjut hingga berakhirnya masa jabatan Ahmad Lamo sebagai Gubernur di daerah ini. Menjelang pemilihan Gubernur pengganti Ahmad Lamo, Golkar dan Corhas

²² *loc-cit.* hal 288.

²⁴ *Ibid.* hal 289.

mencalonkan mantan panglima Kodam, Brigader Jenderal A. Aziz Bostam dan Mayor Jenderal Her (chaeruddin) Tasning yang pernah menjadi kepala staf Kodam dan duta besar untuk Australia dan pada waktu itu sedang menjabat duta besar untuk Singapura. Sementara Ahmad Lamo sendiri mencalonkan Andi Oddang.²⁵ Ia seorang yang tidak ambisius dan mempunyai latar belakang sebagai bangsawan tinggi. Akhirnya atas dukungan dari Presiden Suharto, maka dalam pemilihan Gubernur oleh DPRD yang didominasi oleh Golkar, Andi Oddang memperoleh 20 suara sedangkan pesaingnya yakni Andi Moctar dan Daud Nampo masing-masing memperoleh 8 dan 7 suara.²⁶ Akhirnya pada bulan Juni 1978 Andi Oddang dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang baru. Sementara Ahmad Lamo ditunjuk sebagai salah seorang dari wakil ketua MPR mewakili (fraksi) daerah.

Situasi perpolitikan yang demikian, jelas bahwa kaum militer di Sulawesi Selatan sangat mendominasi kehidupan sosial politik di daerah ini. Jabatan-jabatan penting di daerah ini hampir semuanya dipegang oleh orang-orang dari militer, mulai dari Gubernur sampai ke pejabat kecamatan. Golkar sebagai salah satu organisasi politik di daerah ini tidak dapat berbuat banyak, karena organisasi ini juga di kendalikan oleh kaum militer. Ketidakmampuan Golkar untuk berbuat banyak terlihat ketika Golkar dan Corhas tidak mampu memenangkan calon mereka menjadi Gubernur, justru calon Ahmad Lamo yang terpilih. Namun yang perlu diketahui bahwa kepeguruan dari Golkar banyak yang

²⁵ Lihat, Riwayat Hidup, *Andi Oddang*, pada daftar nama-nama Gubernur di Sulawesi Selatan. Lampiran II.

²⁶ Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat Daerah*, op-cit. hal 293.

berasal dari kaum militer, bahkan posisi penting dalam organisasi ini mereka duduki.

Kondisi perpolitikan di Sulawesi Selatan semakin tidak menentu, ketika terjadinya peleburan partai politik pada tahun 1973. Pertumbuhan dan perkembangan partai politik di daerah ini mendapat tekanan-tekanan dari pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan Golkar, organisasi ini justru semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dalam kondisi yang demikian, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk meleburkan partai-partai politik, sehingga di Indonesia tinggal 2 partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ditambah satu organisasi politik yaitu Golkar.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai langkah awal politik di Indonesia, ditandai dengan lahirnya sistem multi partai dan sistem demokrasi liberal yang disertai dengan lahirnya partai-partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam serta bermacam-macam kepentingan politiknya. Dengan kondisi politik di Indonesia yang seakan tidak terkontrol, pertentangan antara partai politik di DPR menjadi paktor penyebab kabinet selalu berganti-ganti.

Di Sulawesi Selatan, sejak tahun 1950 hingga memasuki pemerintahan Orde Baru, terjadi beberapa kali pemberontakan. Pemberontakan pertama dipimpin oleh A. Azis yang ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT). Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1945. Hasil komfrensi ini menyebabkan Indonesia menjadi negara Serikat (RIS).

Pemberontakan A.Azis dapat diatasi, ketika Letnan Kolonel Alex Kawilarang sebagai komandan militer di bantu oleh A. Matta Latta berhasil membujuk A. Azis untuk pergi kejakarta dan kemudian di tangkap.

Lain halnya dengan pemberontakan Kahar Muzakkar, ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang diantaranya, akibat penolakan pemerintah pusat terhadap tuntutan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Kesatuan ini mengiginkan penggabungan seluruh unit gerilya di Sulawesi Selatan ke dalam

Brigade Hasanuddin dan pegangkatan Kahar Muzakkar sebagai komandannya. Pemberontakan ini berakhir pada tahun 1965, sementara Kahar Muzakkar sendiri tertembak pada tanggal 3 Februari dalam tahun yang sama.

Selain pemberontakan A. Azis dan Kahar Muzakkar, di Sulawesi Selatan juga dipengaruhi oleh pemberontakan PRRI/PERMESTA yang wilayah cakupannya meliputi seluruh Sulawesi. Namun pemberontakan ini menyerah dalam tahun 1961, karena adanya kebijakan pemerintah yang memberi amnesty terhadap mereka yang menyerah dalam periode tertentu.

Sebagai langkah antisipasi gejolak tersebut maka presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli 1959, yang menetapkan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 kemudian disusul dengan perubahan sistim pemerintahan dari demokrasi liberal ke sistem demokrasi terpimpin.

Mengawali sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengembangkan gagasan nasional agama dan komunis (NASAKOM) yang menjurus kearah pengkotak-kotakkan masyarakat. Gagasan ini didukung oleh PKI, mereka menginginkan agar semua lembaga Negara dan lembaga kemasyarakatan terutama golongan fungsional di NASAKOM-kan.

Sebagai langkah antisipasi yang diambil oleh golongan fungsional untuk membendung tekanan PKI, maka mereka berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya dalam masyarakat. Atas dorongan ABRI maka golongan fungsional memebentuk organisasi yang diberi nama Sekertariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tanggal 20 oktober 1964.



Peran dari Sekber Golkar mulai nampak ketika meletusnya G.30.S/PKI, mereka bersama ABRI, pemuda, mahasiswa, dan rakyat yang pancasilais berhasil menumpas penghianatan PKI secara fisik. Dalam kondisi bangsa yang tidak menentu, demonstrasi terjadi dimana-mana menentanga kebijakan politik dan ekonomi Soekarno. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya Supersemar pada tanggal 11 Maret 1966, dan ini merupakan awal lahirnya Orde Baru.

Ternyata tuntutan untuk menjatuhkan Soekarno juga disuarakan oleh kelompok Islam di Sulawesi Selatan seperti KAMI, KAPPI, NU, dan Organisasi Islam lainnya. Mereka meningkatkan emosi permusuhan terhadap pendukung Soekarno yang sudah melemah, bahkan setelah rezim Orde Lama jatuh berbagai kelompok yang telah mendorong pencabutan secara radikal pengaruh Soekarno tetap aktif. Kondisi ini merefleksikan respon Sulawesi Selatan terhadap kecenderungan pemerintah Orde Baru dalam mengurangi pengaruh kelompok-kelompok Islam.

Pengaruh politik pusat kurang mendapat respon dari masyarakat Sulawesi Selatan juga disebabkan oleh penetrasi politik didaerah ini yang relatif dangkal. Tercatat selama masa jaya partai tahun 1950-1957 tidak satupun dari partai tersebut yang pernah berkembang dengan baik di Sulawesi Selatan. Partai yang ada di daerah ini cukup banyak jumlahnya baik itu partai yang berdasarkan Agama Kebangsaan maupun yang berdasarkan Marxisme.

Kondisi partai politik yang seakan-akan tidak penting, maka pada tahun 1961 terjadi penyederhanaan partai. Partai politik yang ada sebelum terjadi penyederhanaan pada tahun 1961, yakni : Masyumi, PSI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Murba, PSII, IPKI, PKI, dan Perti. Setelah terjadi penyederhanaan partai politik pada tahun 1961, jumlah partai yang diakui tinggal sepuluh. Kesepuluh partai tersebut adalah : PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Murba, PSII, IPKI, PKI, dan Perti. Akan tetapi, penyederhanaan itu menimbulkan masalah dalam pemerintahan Orde Lama, yakni semakin meruncingnya pertentangan ideologi dari partai politik dan masyarakat.

Di Sulawesi Selatan, Golongan Karya sebagai salah satu kekuatan politik di daerah ini telah mampu melakukan hubungan timbal balik dengan pemerintah setempat. Hubungan ini jelas terlihat ketika menjelang pemilu 1971 pemerintah di Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi Golkar, sementara kaum militer melakukan tekanan-tekanan politik di daerah-daerah.

Kemenangan Golkar pada pemilu 1971 baik di tingkat nasional maupun di daerah tingkat I dan daerah tingkat II menandakan bahwa strategi yang dimainkan baik dari pusat maupun di daerah setempat berhasil dengan baik ini terbukti pada presentase perolehan suara untuk tingkat nasional Golkar memperoleh 62,8 persen suara sedangkan di daerah Propinsi Sulawesi Selatan sendiri, Golkar menang mutlak dengan memperoleh 78,2 persen dari jumlah keseluruhan suara di daerah ini.

Dengan kemenangan ini maka membawa suatu perubahan dalam komposisi keanggotaan baik itu DPR pusat maupun DPRD tingkat I khususnya Sulawesi Selatan. Komposisi anggota DPRD tingkat I Sulawesi selatan di dominasi oleh anggota-anggota dari fraksi Golkar dan ini menandakan bahwa peran Golkar sejak pemilu 1971 sudah mulai nampak.

Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi kehidupan sosial politik di Indonesia maka oleh pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan dalam menertibkan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Sebagai hasil kebijakan tersebut maka dalam tahun 1973 di Indonesia terjadi peleburan partai sehingga jumlah partai tinggal dua partai politik ditambah satu organisasi sosial politik. Kedua partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Demokrasi Indonesia merupakan peleburan dari IPKI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, dan Partai Nasional Indonesia, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan merupakan gabungan dari Partai Muslim Indonesia, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Islam Perti dan Nahdatul Ulama. Golongan Karya merupakan gabungan dari beberapa unsur yakni golongan buruh dan pegawai, pokok golongan tani, pokok golongan pengusaha nasional, pokok golongan bersenjata, pokok golongan alim ulama, angkatan proklamasi 17 Agustus 1945 dan angkatan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Latif, **Dinamika Lokal Militer di Sulawesi Selatan**, dalam Edwar. L. Poelinggomang and Suriadi Mappangara, **Dunia Militer di Indonesia keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi Selatan** Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002)
- Agustinus, **Palang Merah Indonesia (PMI) di Sulawesi Selatan**. Ujung Pandang Fak, Sastra Unhas, 1998).
- Amin Rais, **Demokrasi dan Proses Politik, Pemilihan Umum di Indonesia**. (Jakarta ; Selain Prisma, 1992).
- Arief We Onggang, **Tentang Sejumlah Orang-Orang Sulawesi Selatan** (Jakarta : Yayasan Mitra Angin Mammiri, 1998).
- Arbi Sanit, **Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan** (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Barbara Sillar Harvey, **Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TIL**. (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- DPD Golkar Propinsi Sulawesi Selatan, **Susunan DPD Golkar TK. I Sulawesi Selatan, 1971 - 2003**.
- DPP Golkar, **Bahan Diklat kader Golkar Kelompok B**. (Jakarta, 1995).
- Edward L. Poelinggomang and Suriadi Mappangara Ed, **Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi Selatan**, (Yogyakarta : UGM Pres, 2002).
- Harsja W. Bachtiar, **Siapa Dia ? Perwira Tinggi TNI AD**. (Jakarta, 1995).
- Ichlasul Amal, **Hubungan Pusat Daerah, Khusus Sumatera dan Sulawesi Selatan 1943-1979**. Yogyakarta Pusat Antar Universitas, Studi Sosial, UGM, 1988).
- Ichlasul Amal, **Teori-Teori Mutakhir Partai Politik**, (Ujung Pandang LPIIS UNHAS, 1992).

- Iman Pratigny, **Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar, Perjuangan Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17 Agustus 1945** (Jakarta : Yayasan Bhakti, 1964).
- Rezia D. Diana Putra **Militer Ditengah Suksesi Kepemimpinan Nasional, Eksistensi 1967 dan Suksesi 1998** dalam Edwar L. Poelinggomang and Suriadi Mappangara, **Dunia Militer di Indonesia Keberadaab dan Peran Militer di Sulawesi** (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2000).
- Rusli Karim, **Peranan ABRI Dalam Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979)** (Jakarta : Yayasan Idayu, 1983).
- To'do'Puli, **Memory Achmat Lamo Gubernur KDH TK I.** (Sulawesi Selatan, 1966-1978).
- Kuntowijoyo, **Metodologi Sejarah,** (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1964).
- Leo Suryadinata, **Golkar dan Militer, Study Tentang Budaya Politik** (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1992).
- Louis Gottchalk, **Diterjemahkan oleh Nugroho Noto Susanto, Mengerti Sejarah,** (Yayasan Penerbit UI, 1975).
- Meriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik** (Jakarta, 1977).
- Mohtar Mosoed, **Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru** (Jakarta : LP3ES, 1988).
- Muhammad Rusli karim, **Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik Indonesia (1965-1979)** (Jakarta : Yayasan Idayu, 1983).
- Rahman Syah, **Golkar Dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (1971-1981).** (Ujung pandang : Fak. Sastra Unhas, 1995).
- Rasyid Rahman, **Perkebangan Golkar di Kabupaten Gowa (1979-1982),** (Ujung Pandang : Sastra Unhas 1997).
- Roberto Bagun, **Derectory Golkar Pembangunan** (Jakarta : Yayasan Tri Sukses, 1994).



Sartono Kartodirjo, **Metode Penggunaan Bahasa Dokumen Dalam Koentjaraningrat (ed), Metode-metode Penelitian Masyarakat**, (Jakarta : Gramedia, 1977).

Tinambak, **Golkar Sebagai Salah Satu Kekuatan Sosial Politik di Kota Madya Ujung Pandang** (Ujung Pandang : Program Ilmu-ilmu Sosial dan Sastra Bidang Sosial Politik, Unhas, 1981).

To'do Puli, **Memori Ahmad Lamo, Gubernur Kadh TK I Sulawesi Selatan 1966-1978**, Ujung Pandang 1978.

Data Arsip

Arsip Propensi Sulawesi Selatan, **Peta dan Daftar partai-partai Politik yang berdasarkan Agama, Kebangsaan dan Marzime dalam Propensi Sulawesi Selatan tahun 1955**, No. Reg. 237, Kode Dos. No. 27.

Arsip Priobadi Saleh lahade, **Pernyataan Program Perjuangan Golongan Karya**, No. Reg. 453, hal. 3.

Inventaris Arsip (Rahasia) Propensi Sulawesi Selatan Tenggara (Sul-selra), **Propensi Sulawesi Selatan, Arsip Nasional R.I, Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan**, Makassar 1996.

LAMPIRAN I
NAMA-NAMA PANGDAM DI SULAWESI SELATAN DAN
RIWAYAT HIDUPNYA

JENDERAL TNI PURNAWIRAWAN ANDI MATTALATTA
1956-1957

Lahir di Barru Sulawesi Selatan tanggal 1 September 1920. Agama Islam. Pendidikan : sekolah calon pamong di OSVIA, Makassar. Seskoad, Bandung 1960-1962. Jabatan : Komandan Batalyon Brigade XVI Sulawesi Selatan 1950-1952. Kepala Staf RI-23 dan komandan Batalyon (Danyon) Pare-pare 1952. Komandan Komando Militer Kota Makassar 1945-1957. Deputi Komandan Komando Daerah Perang Sulawesi Selatan Tenggara 1956-1957. Kodam Sulawesi Selatan Tenggara 1957-1959. Anggota DPR-RG 1960. Ketua KONI pusat 1968. Ketua KONI Sulawesi Selatan. Anggota DPR/MPR Republik Indonesia. Anggota DPA. Ketua Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan sekarang.*

JENDERAL TNI PURNAWIRAWAN ANDI MUH. AMIR JOESOEF
1959-1964

Lahir di Kajuara, Kab. Bone, Sulawesi selatan tanggal 23 Juni 1928. Memperoleh latihan : Combat Intelligence A.D., Latihan terjun Payung, di Bandung 1950. Memperoleh pendidikan : Pendidikan di Hollan Gebreid Lager, Onderwijs (Mulo), Sekolah Menengah Atas, Combat Intelligence TNI-AD, Latihan terjun Payung di Bandung 1950, Sekdah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD), 1952-1953, U.S. Army Infantry Officers Advanced Course, Air Boune Course, Fort Benning, Georgia di Amerika Serikat, kursus singkat khusus, angkatan IV sekolah staf dan komando Angkatan Darat (Seskoad), 1969.

Jabatan yang pernah diperolehnya, yakni : Ajudan Panglima tentara dan teritorial (T&T) VII/Wirabuana Indonesia bagian timur, menjadi Kepala Staf

* Arif We Onggang, *Tentang Sejumlah Orang-orang Sulawesi Selatan 1988*, Jakarta, Yayasan Mitra Anging Mammiri 1998. Hal 182.

Resimen Infantri 24 di Manado, 1953-1945, Komandan Resimen Infantri Hasanuddin, Komandan Militer Kota Besar (KMKB) Makassar, Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Hasanuddin Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tanggal 7 Februari 1959 sampai 27 Desember 1964, Ketua Universitas Bungkarno di Sulawesi Selatan pada tahun 1964, Menteri industri ringan kabinet Dwikora (27-8-1964 sampai 21-2-1966), menteri Perindustrian Dasar pada Kabinet Dwikora (21-2-1966 sampai 25-7-1966), Menteri Perindustrian Dasar dan ringan pada Kabinet Ampera (25-7-1966 sampai 11-10-1967), Menteri Perdagangan pada Kabinet Ampera (11-10-1967 sampai 6-1-1968), Menteri Perindustrian Kabinet pembangunan II RI 9 28-3-1973-1978), Menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI dilantik 31 Maret 1978, serah terima jabatan tanggal 17 April 1979 masa jabatan hingga 1983, kepala badan pemeriksaan keuangan (BPK) RI sejak 1983. *

LETNAN JENDERAL TNI POERWANEGARA SOLIHIN GAUTAMA

1965-1968

Lahir di Tasik Malaya tanggal 21 Juli 1926. Pernah menjadi : Komandan Seksi Resimen TKR Bogor tahun 1945-1947, menjadi komandan Kompi tentara Republik Indonesia pelajar, Komandan Batalyon 2 Brigade 17, komando batalyon tengkorak, Brigade 13, Devisi Siliwangi tahun 1947-1949, menjadi Komando Batalyon 204, tentara dan teritorial Bangka (1951-1953), jadi Guru Sekolah Staf dan Komando AD (1954-1956), kemudian jadi Asisiten 2 / operasi komando Daerah Militer VI / Siliwangi Jawa barat (1959- 1962), selanjutnya menjadi Komandan Batalyon 330 / Kujang I Devisi Siliwangi, "Garuda II" di Kongo tanggal 9 september 1960, menjadi Wakil kepala staf umum 2 kodam VI / Siliwangi tanggal 21 Januari 1964 sampai 21 September 1966, selanjutnya menjadi kepala staf Kodam VIV / Hasanuddin (Sul-sel dan Tenggara) 1964-1965 setelah itu ia menjadi Panglima Kodam XIV / Hasanuddin tanggal 12 September

* Harsja W. Bactiar, *Siapa Dia ? Perwira Tinggi TNI-AD Jakarta*, Penerbit Djambatan 1988. Hal 152.

1965 sampai 3 April 1968, menjadi Gubernur Akademi ABRI (Akabri) bagian umum I darat 27 Agustus 1968-9 Januari 1970, jadi Gubernur / KDH Propinsi Jawa Barat dilantik tanggal 15 Januari 1970 sampai 1975, selanjutnya menjadi sekretaris pengendalian operasional pembangunan, dilantik 24-8-1977, ia juga ketua Komisi Tinju Indonesia (KTI).*

SAJIDIMAN SOERJOHADIPRODJO

1968-1970

Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, 21 September 1927. Memperoleh pendidikan di Europeche Legere School, Hogere Burgerschool sampai lulus 1943, SMT tahun 1943-1946. Angkatan I Akademi Militer Yokyakarta 1945-1948. Fuchrungs Akademie, Hamburg, Jerman lulus tahun 1956. Sekolah Staf dan Komando A.D, 1964-1965. Pernah menjadi : Komandan, Peleton Batalyon Nahubi, Devisi Siliwangi, tahun 1948-1949. Komandan Kompi 305, Devisi Siliwangi tahun 1949-1951. Ajudan Panglima, Devisi Siliwangi 1951-1952. Instruktur, pusat Infantri, merangkap staf pengajar pusat infantri komandan batalyon 309/Taruma Negara (Sumedang) Tentara dan territorial III/Siliwangi (Jawa Barat) 1 Juli 1956 sampai 1 April 1960. Komandan, Resimen Taruna, Bandung 1961-1962, wakil Asisten 2 /operasi Kepala Staf AD 1965-1968. Konsultan Sindikat Tryubaya Cakti, seminar AD ke II, seskoad, Agustus 1966. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin (Sulawesi Selatan dan Tenggara), tanggal 3 Agustus 1968-16 Maret 1970. Asisten 3 /personil, merangkap ketua gabungan (G-3) personil Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Republik Indonesia tanggal 11 April 1970-April 1973, merangkap asisten 3 /personil komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, merangkap Deputy Kepala Staf AD tanggal 26 Maret 1973-12 Juni 1974. Gubernur Lemhanas, 15 Juni 1974-3 Nopember 1978. Duta Besar RI untuk

* Ibk. Hal 243.

Jepang, dilantik 23 Juni 1979-1983. Pengajar program pengkajian ketahanan Nasional Fak. Pasca Sarjana, Universitas Indonesia 1985-1987.*

ANDI AZIS BOESTAM

1970-1973

Lahir di Mare, Bone, Sulawesi Selatan tanggal 6 Juni 1926. Memperoleh pendidikan di : sekolah Staf dan Komando AD. Pernah menjadi : Anggota Resimen Hasanuddin Brigade II Kesatuan reserve umum (KRU) X, kemudian Brigade 16, Yogyakarta diperbantukan pada Staf A.AD Jakarta, 1950, diperbantukan pada Staf tentara dan teritorial (T&T) VII/Wirabuana (Sulawesi, Maluku, Bali Nusatenggara). Asisten 4/logistik Kepala Staf Komando daerah militer (Kodam) XIV/Hasanuddin (Sulawesi Selatan dan Tenggara) sampai 3 Februari 1959. Kepala Staf Kodam XIV/Hasanuddin, 1969-1970. Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, 16 Maret 1970 sampai 10 April 1973. Komandan Jenderal Komando Pengembangan Pendidikan dan latihan TNI-AD, 5 Oktober 1975 sampai 1978 (?), Asisten Teritorial, militer pertahanan keamanan (Hankam) RI untuk Papua Nugini, Februari 1981. meninggal 1982.*

R. HASAN SLAMET

1973-1975

Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Agustus 1926. Memperoleh pendidikan kursus singkat, Angkatan I, sekolah Staf dan Komando AD 1966. Pernah menjadi : Komandan Batalyon Infantri 304/Pasupati, tentara dan Teritorial (T&T) VI/Siliwangi (Jawa Barat), 4 Januari 1958-12 Februari 1959. Asisten 5/Teritorial, Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Siliwangi (Jawa Barat) Wakil staf kodam VI/Siliwangi tmt 23 Desember 1966, Kepala staf kodam VI/ Siliwangi 1973. Panglima Kodam XIV/Hasanuddin (Sulawesi Selatan dan Tenggara), 10

* *Ibid.* Hal 276.

* *Ibid.* hal 87.

April 1973-22 September 1975. Wakil Panglima, komando wilayah pertahanan (Konwilhan) IV/Irian Jaya dan Maluku, 27 September 1975. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Maluku, sejak dilantik 20 Juli 1976-1987.*

* *Ibid.* Hal 306.

LAMPIRAN II

NAMA-NAMA GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ANDI AHMAD RIFAI (1965-1966)

- Lahir di Sulawesi Selatan 1928 (?). Memperoleh pendidikan dikursus tingkat khusus, sekolah Staf dan Komando AD (Seskoad), 1966. Pernah menjadi
1. Wakil Komando Batalyon C, Brigade 16 (Jatim) 1948
 2. Kepala Staf Batalyon Mattalatta 1950
 3. Kepala Staf Resimen 23, Tentara dan Teritorium (T&T) VII/Wirabuana di Pare-Pare Sulawesi Selatan, 1954-1957
 4. Komando Resimen 23, Tentara dan Teritorium (T&T) VII/Wirabuana di Pare-Pare Sulawesi Selatan, Januari 1957
 5. Kepala Staf Komando Daerah Militer (KODAM) XIV Hasanauddin Sulawesi Selatan, 18 November 1959
 6. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan 1965 (?).
 7. Anggota DPR-GR, 9 February 1968
 8. Direktur Utama PN Semen Tonasa, Departemen Perindustrian RI, 1972.*

H. ACHMAD LAMO (1967-1978)

Lahir di Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, 6 September 1920. Agama Islam, Pendidikan : Sekolah polisi di Sukabumi tahun 1941, SMP di Blitar tahun 1948, Gevioner tahun 1950, SMA di Ujung Pandang tahun 1954, Kapaltu tahun 1956 dan Kupala tahun 1963. Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi Selatan 1967, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan 1972, Gubernur Sulawesi

* Harsja W. Bachtar, *Siapa Dia? Perwira Tinggi TNI-AD*, Jakarta, Penerbit Njambatan 1988. Hal 200.

selatan 1972-1978. Wakil ketua MPR sejak 1978. Jabatan terakhir yakni menjadi wakil MPR-RI. Alamat : Jalan Haji Bau No. 27 Ujung Pandang.*

ANDI ODDANG (1979-1983)

Lahir DI Barru tahun 1926. Agama Islam. Pendidikan : SD, SMP, SMA, Seskoad, Lemhanas. Pekerjaan : TRI Laut Sidoarjo, komandan Batalyon Worang, Komandan Kodim Kalimantan Barat, Asisten Kepala Staf AD Kalimantan Barat, Komandan Korem Kalimantan Barat, Kepala Staf Kodam XIV Hasanuddin 1976-1979, Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1979-1983. Alamat : Jln. Daha III No. 1-B Kebayoran Barat Jakarta selatan.**

ACHMAD AMIRUDDIN (1983-1993)

Lahir di Gilirang Kabupaten Wajo 25 Juni 1932, Agama Islam, Pendidikan : SD Paria 1946, SMP Makassar 1950, SMA Bandung 1952, Universitas Indonesia bandung, ITB 1958, Doktor, Universitas Kentucky USA 1961, Doktor Honoris Causa Bidang Sains Universitas Kebangsaan Malaysia. Pekerjaan :

1. Guru Besar ITB Bandung 1968- 1973
 2. Ketua Bagian Kimia Universitas Kebangsaan Malaysia 1970-1973
 3. Rektor Universitas Hasanuddin Ujung Pandang 1973-1982
 4. Koordinator Kopertis VII 1976-1983
 5. Deputi Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan BPPT 1982-1983
 6. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 1983-1993
 7. Wakil Ketua MPR-RI 1993-1997
 8. Ketua Dewan Penasehat Kawasan Timur Indonesia 1993-sekarang.
- Organisasi-organisasi lain :

1. Sekretaris Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia Bandung 1955-1957

* *Tempo, Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982*, Jakarta, Grafiti Press, 1981. Hal 319.

** *Arief W. Onggang, Tentang sejumlah Orang-orang Sulawesi selatan 1998*, Jakarta, Yayasan Mitra Anging Mamiri. Hal 206.

2. Ketua HMI cabang Bandung 1956-1958
 3. Warga Kehormatan BPP KKSSS 1995- sekarang
 4. Ketua Yayasan pendidikan Latimojong 1978-sekarang
 5. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Sulawesi Selatan 1983-1993
 6. Ketua Himpunan Masyarakat Indonesia 1996-sekarang
- Alamat : Jln. Teratai IX BI No. 23 Tanjung Barat Indah Jakarta Selatan.*

ZAINAL BASRI PALAGUNA (1993- 2003)

Lahir di Soppeng 9 Maret 1939, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Rakyat 1952, SMP 1955, SMA 1958, Akademi Militer Nasional 1962, Lemhanas.
Pekerjaan :

1. Dandrem 133 Tadulako 1983- 1986
 2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 1987-1989 :
 3. Kepala Staf Kodam Jaya 1989-1990
 4. Dan Puster AD 1990
 5. Panglima Kodam VII Wirabuana 1990-1993
 6. Gubernur Sulawesi Selatan 1993-1998
 7. Gubenur Sulawesi Selatan 1998-sekarang
- Kantor : Kantor Gubernur Jln. Urip Sumoharjo No. 269 Ujung Pandang
Rumah : Jln. Jend. Soedirman No. 51 Ujung Pandang.*

* Arief W. Onggang, *Ibid*, hal 28-29.
* *Ibid*, Hal36.

LAMPIRAN III
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN GOLONGAN KARYA
TINGKAT I SULAWESI SELATAN
(1971-1974)

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN
1	A.R. MANDJI	KETUA
2	SOEWONDO	WAKIL KETUA
3	Drs. M. PARAWANSA	ANGGOTA
4	Dr. K. TANDI RERUNG	ANGGOTA
5	ALI ASAN ACHMAD	ANGGOTA
6	M. ARIF SIRAJUDDIN	SEKRETARIS
7	Drs. HISJAM ICHSAN	WAKIL SEKRETARIS
8	Drs. ABDUL KARIM LAWE	WAKIL SEKRETARIS
9	M.K. MANGIRI B.A	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG PEG. NEGERI DAN TENAGA KERJA
10	B.S. LOEGIMAN	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG BUDAYA DAN SPIRITUAL
11	Drs. ARIFIN NOOR	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG EKONOMI DAN PRODUKSI
12	MAJOR INF. M.R. SALAM FESSY	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG HANKAM
13	Dr. TAJUDDIN CALID	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG PEMUDA, CENDIKIAWAN DAN WANITA

SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
TINGKAT I SULAWESI SELATAN
(1974-1979)

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN
1	A.R. MANDJI	KETUA
2	E.A. MAKODOMPIT, MA	WAKIL KETUA I
3	Dr. TAJUDDIN KHALID	WAKIL KETUA II
4	M. A. SIRAJUDDIN	SEKRETARIS
5	Drs. UMAR LAKUNNU	BENDAHARA
6	Dr. K. TENDIRERUNG	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG UMUM, DAN PERENCANAAN
7	MOHAMMAD SJAH	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG ORGANISASI DAN PENDIDIKAN
8	JALIL SIKRI	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG PEGAWAI NEGERI
9	MOHAMMAD ANIS	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG TENAGA KERJA
10	Drs. ARIFIN NOOR	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG USAHAWAN
11	Drs. SAINAL WALI AMRULLAH	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG KOPERASI
12	Ir. RAJA GAU	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG SENI DAN BUDAYA
13	Drs. YASMIN MIALA	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG AGAMA, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME, SOSIAL BUDAYA
14	Dr. SIAMSI LILI	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG PEMUDA, MAHASISWA DAN PELAJAR
15	NY. HAPIDA BASO	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG WANITA
16	Ir. FAKHURDIN	ASISTEN SEKRETARIS BIDANG CENDIKIAWAN

SUMBER DATA : DPW GOLKAR SUL-SEL

**SUSUNAN DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA
TINGKAT I SULAWESI SELATAN
(1979-1981)**

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN
1	H. AR. SYAD B.	KETUA
2	Dr. TAJUDDIN CHALIK	WAKIL KETUA
3	Drs. H. DARWIS ABDULLAH	WAKIL KETUA
4	Dr. SJAMSI LILI	WAKIL KETUA
5	Dr. HAIJU RAJEN PANANRANG	WAKIL KETUA
6	MOH. JUSUF SH	SEKRETARIS
7	Drs. HAMID IBRAHIM	WAKIL SEKRETARIS
8	Drs. HADEDE BEDDU MANI	WAKIL SEKRETARIS
9	Dra. HADRAH	WAKIL SEKRETARIS
10	Drs. UMAR LAKUNNU	BENDAHARA
11	NG. SAMSIR SIRI	WAKIL BENDAHARA
12	Drs. M. ISKANDAR ROTTE	WAKIL BENDAHARA
13	- Drs. ARIFIN NUH - Drs. ABD. RAHIM	BIRO PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN KADERISASI
14	RACHMAN ARGE	BIRO PENERANGAN DAN MASS MEDIA
15	NY. E. MARIYA KARIM, SH	BIRO PERANAN WANITA
16	MUH SAID NY NURSIJANAH TALIB SH	BIRO PEMUDA, MAHASISWA DAN CENDIKIAWAN
17	Drs. M.K. MANGIRI	BIRO TENAGA KERJA DAN KARYAWAN PEGAWAI NEGERI
18	Ir. RAJA GAU A. BASIR	BIRO TANI NELAYAN DAN PENGRAJIN
19	HUSEIN IBRAHIM MAPEABANG BETTA	BIRO KOPERASI, WIRASWASTA DAN TRANSMIGRASI
20	ANDI SAJARUDIN TOBOTIYU	BIRO KEBUDAYAAN DAN KEROHANIAN
21	Drs. EK. EDDY BARAMULI	BIRO PENERANGAN SARANA

SUMBER DATA : DPW GOLKAR SUL-SEL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLKAR
TINGKAT I SUL-SEL
(1984-1989)**

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN
1	H. ALIM BAHRI	KETUA
2	Dr. SJAMSI LILI	WAKIL KETUA
3	K.H. ABD. MUTI Jusuf	WAKIL KETUA
4	Drs. ABDURRAHIM	SEKRETARIS
5	Drs. H. HADARAH	WAKIL SEKRETARIS
6	Dr. H. MUSTAFA DJIDE, SKM	WAKIL SEKRETARIS
7	Drs. EK. EDDY BARAMULI	BENDAHARA
8	Dr. H. AISYAH RADJENG PANANRANG, SKM	WAKIL BENDAHARA
9	H. HASAN SAMANA Ir. RADJAGAU	BIRO PEMENANG PEMILU
10	Drs. BURHANUDDIN ILHAM MATTALATTA	BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS-KURSUS
11	RAHMAN ARGE ZAINAL ARIFIN	BIRO PENERANGAN, PENERBITAN DAN MASS MEDIA
12	Dr. NURDIN A. MAPPEWALI ISKANDAR MANDJI	BIRO PEMUDA

13	Ir. HUSNI MANGGA BARANI Drs. SJAHRIR TAJUDDIN	BIRO TANI DAN NELAYAN
14	HUSAIN IBRAHIM MAPPEABENG BETTA. BA	BIRO TENAGA KERJA, KOPERASI DAN WIRASWASTA
15	NY. A. WELLY ARSYAD B NY IDA ANDI SURADI	BIRO WANITA
16	Drs. HAMID RASYID Drs. MUHAMMAD ACHMAD	BIRO KEROHANIAN
17	Drs. J SALUSU BA RIVAI BULU	BIRO CENDIKIAWAN SENI DAN BUDAYA DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

SUMBER DATA : DPW GOLKAR SUL-SEL

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLKAR
TINGKAT I SUL-SEL (1988-1993)

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN
1	H. ALIM BACRIE	KETUA
2	H. HASAN SAMANA	WAKIL KETUA
3	Drs. H. EDDY BARAMULI	WAKIL KETUA
4	Drs. ABDUL RACHMAN	WAKIL KETUA
5	Drs. H.M. ISKANDAR MANDJI	SEKRETARIS
6	Drs. H. MEKKA HAYADE	WAKIL SEKRETARIS
7	Drs. H. SYAHRUDDIN MAKKA	WAKIL SEKRETARIS
8	Drs. H. IDRIS MAKKASAU	WAKIL SEKRETARIS
9	H. ANDI GASALING	BENDAHARA
10	Dr. H NURDIN A. MAPPEWALI	WAKIL BENDAHARA
11	Dr. HARMIEN MATTALATTA MATTALATTA	WAKIL BENDAHARA
12	H.M KASIM DM	KETUA BIRO PEMENANG PEMILU
13	A ALFIN NOER	KETUA BIRO PEMENANG PEMILU
14	Drs. H. ARIFIN NOOR	KETUA BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
15	Drs. H.M. AKIB FATTA	KETUA BIRO ORGANISASI KEANGGOTAAN DAN KADERISASI
16	Drs. ABD KARIM	KETUA BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS-KURSUS
17	Drs. A.J LONTOH	KETUA BIRO PENDIDIKAN DAN KURSUS-KURSUS
18	RAHMAN ARGE	KETUA BIRO PENERANGAN, PENERBITAN DAN MASS MEDIA
19	UDIN PALISURI	KETUA BIRO PENERANGAN, PENERBITAN DAN MASS MEDIA
20	PROF. Dr. A. MAPPADJANTI	KETUA BIRO PEMUDA
21	Dra. SYUHADA HUSSEIN	KETUA BIRO PEMUDA
22	M.S. NURDIN ABANG	KETUA BIRO TANI DAN NELAYAN
23	- Ir. SYAMSUL BACHRI SIRAJUDDIN - A. RAHMAN AT	KETUA BIRO TANI DAN NELAYAN
24	Ir. TS SUSILO HARAHAP	KETUA BIRO TENAGA KERJA, KOPERASI DAN SWASTA
25	Drs. IBNU MURSIR	KETUA BIRO TENAGA KERJA, KOPERASI DAN SWASTA
26	Dra. NY MURTINI	KETUA BIRO WANITA
27	Dra. A NINIEK F LANTARA	KETUA BIRO WANITA
28	Dr. H. UMAR SIHAB	KETUA BIRO KEROHANIAN

29	Drs. H. ISKANDAR IDY	KETUA BIRO KEROHANIAN
30	- Dr. T.R. ANDI LOL - Prof. Dr. F. SUMBUNG	KETUA BIRO CENDEKIAWAN, SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
31	Drs. AMBAS SYAM	KETUA BIRO CENDEKIAWAN, SENI BUDAYA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
32	- Prof. Dr. H. BASRI HASANUDDIN, MA - Prof. Dr. NY KUSRIAH KRISTANTO	KETUA BIRO PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP ENERGI DAN SUMBER ALAM
33	Drs. MADJID SALLATU, MA	KETUA BIRO PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP ENERGI DAN SUMBER ALAM

SUMBER DATA : DPW GOLKAR SUL-SEL

Lampiran IV

Tabel Hasil pemilu DPR Pusat tahun 1955
Di Sulawesi Selatan (Partai Utama)

	Jumlah suara	PNI (%)	Masyumi (%)	NU (%)	PKI (%)	Parkindo (%)	PSII (%)
Kota Makassar	91508	3545 (32,7)	29951 (15,6)	14193 (15,8)	5281 (5,8)	8440 (9,2)	12141 (13,3)
Makassar	215796	3587 (1,7)	73325 (34,0)	84801 (39,3)	1254 (0,6)	532 (0,2)	21868 (10,1)
Bonthain	75132	4067 (5,4)	47441 (63,2)	10480 (13,9)	644 (0,9)	170 (0,2)	6811 (9,1)
Mandar	148870	3222 (2,2)	51029 (34,3)	15308 (10,3)	1703 (1,1)	15723 (10,6)	3928 (2,6)
Bone	124244	3310 (2,7)	80367 (64,7)	31066 (25,0)	600 (0,5)	329 (0,3)	14528 (11,7)
Pare-pare	99927	3770 (3,8)	53839 (53,9)	1545 (1,5)	2938 (2,9)	1214 (1,2)	43104 (43,1)
Luwu	161692	8788 (5,4)	28381 (17,6)	701 (0,4)	5104 (3,2)	91339 (56,5)	10212 (6,3)
Total	917169	30289 (3,3)	364343 (39,7)	158094 (17,2)	17524 (1,9)	117747 (12,8)	112592 (12,3)

Sumber : Panitia Pemilu Indonesia, 1955.

LAMPIRAN V
HASIL PEMILIHAN UMUM SEMUA OPP TAHUN 1971



No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 1971			Total Pemilih
		Partai Muslim (%)	Golkar (%)	Partai Non-Muslim (%)	
1	2	3	4	5	6
	Ujung Pandang	76.880 (39,6%)	106.290 (54%)	11.112 (5,7%)	194.282
	Gowa	50.586 (27,7%)	127.755 (70,1%)	3.950 (2,2%)	182.291
	Takalar	10.642 (13,7%)	66.862 (85,9%)	313 (0,4%)	77.817
	Jeneponto	12.000 (12,3%)	84.840 (87,1%)	509 (0,5%)	97.349
	Bantaeng	5.966 (14,0%)	36.369 (85,3%)	225 (0,5)	42.560
	Bulukumba	9.527 (7,4%)	118.081 (92,4%)	132 (0,1%)	127.740
	Selayar	20.161 (42,0%)	27.060 (56,4%)	775 (1,6%)	47.966
	Sinjai	11.934 (17,6%)	55.661 (82%)	224 (0,3%)	67.839
	Bone	23.531 (9,3%)	225.016 (89,3%)	3.297 (1,3%)	251.846
	Wajo	5.896 (3,5%)	164.080 (96,4%)	187 (0,1%)	170.163
	Soppeng	14.235 (11,7%)	102.137 (84,4%)	4.687 (3,9%)	121.059
	Sidrap	20.260 (20,4%)	76.956 (77,5%)	2.045 (2,1%)	99.261
	Enrekang	9.082 (16,9%)	44.274 (82,6%)	207 (0,4%)	53.563
	Tana Toraja	2.775 (1,9%)	118.933 (83,5%)	20.756 (14,6%)	1.125
	Luwu	49.212 (29,1%)	104.270 (63,4%)	12.213 (7,4%)	33.694
	Mamuju	59 (0,1%)	37.669 (99,8%)	8 (0,1%)	37.726
	Majene	8.714 (21,8%)	31.169 (78%)	93 (0,2%)	39.976
	Polmas	41.563 (29,0%)	96.524 (67,4%)	5.063 (3,5%)	143.123
	Pinrang	20.768 (16,8%)	101.483 (82,1%)	1.257 (1%)	123.526
	Pare-pare	12.698 (37,9%)	18.856 (56,5%)	1.879 (5,6%)	33.533
	Barro	15.509 (24,8%)	46.754 (74,7%)	318 (0,5%)	62.851
	Pangkep	33.368 (33,1%)	66.262 (65,7%)	1.233 (1,2%)	100.853
	Maros	12.584 (13,3%)	81.079 (86%)	622 (0,6%)	94.265
	Jumlah	446.661 (18,8%)	1.958.280 (72,2%)	71.587 (2,89%)	2.457.998

Sumber Data : Arsip DPW GOLKAR Sulawesi Selatan

HASIL PEMILIHAN UMUM SEMUA OPP TAHUN 1977

Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 1977			Total Pemilih
	PPP (%)	Golkar (%)	PDI (%)	
2	3	4	5	6
Ujung Pandang	113.835 (40,5%)	157.747 (56%)	9.683 (3,4%)	281.267
Gowa	36.824 (21,9%)	129.834 (77,3%)	1.183 (0,7%)	167.841
Takalar	4.317 (4,8%)	84.489 (95,1%)	38 (0,0%)	88.884
Jeneponto	15.409 (14,2%)	92.957 (85,7%)	87 (0,1%)	103.453
Bantaeng	7.000 (13,4%)	54.006 (86,4%)	61 (0,1%)	52.127
Bulukumba	9.576 (6,6%)	134.198 (93,3%)	51 (0,0%)	143.825
Selayar	13.407 (26,2%)	37.564 (73,4%)	208 (4,0%)	51.179
Sinjai	10.652 (13,8%)	66.580 (86,0%)	145 (0,2%)	77.377
Bone	2.734 (0,9%)	296.023 (99,1%)	68 (0,0%)	289.825
Wajo	143 (0,1%)	191.204 (99,9%)	3 (0,0%)	1.1912.350
Soppeng	9.612 (7,7%)	113.503 (90,8%)	1.806 (1,4%)	124.921
Sidrap	18.531 (17,8%)	84.980 (81,7%)	442 (0,4%)	103.953
Enrekang	5.247 (8,7%)	59.181 (91,7%)	31 (0,0%)	60.459
Tana Toraja	1.125 (0,7%)	145.574 (97,0%)	3.290 (2,2%)	149.989
Luwu	33.694 (15,94%)	182.256 (83,5%)	2.225 (1,0%)	218.184
Mamuju	895 (2,0%)	44.231 (98,0%)	101 (0,1%)	105.734
Majene	3.307 (7,5%)	40.575 (92,4%)	22 (0,0%)	43.904
Polmas	34.724 (21,5%)	125.476 (77,6%)	1.389 (0,9%)	161.598
Pinrang	27.868 (21,2%)	102.969 (78,5%)	300 (0,2%)	131.137
Pare-pare	13.372 (35%)	24.371 (63,8%)	459 (1,2%)	8.202
Barru	12.627 (19,1%)	53.419 (80,8%)	50 (0,1%)	66.096
Pangkep	10.443 (9,9%)	95.190 (90,0%)	101 (0,1%)	105.734
Maros	7.818 (4,2%)	84.246 (91,2%)	313 (0,3%)	92.337
Jumlah	446.661 (18,8%)	1.958.280 (72,2%)	21.967 (0,79%)	2.802.769

Sumber Data : Arsip DPW GOLKAR Sulawesi Selatan

HASIL PEMILIHAN UMUM SEMUA OPP TAHUN 1982

Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 1982			Total Pemilih
	PPP (%)	Golkar (%)	PDI (%)	
2	3	4	5	6
Ujung Pandang	133.425 (41,9%)	175.596 (55,14%)	9.398 (2,95%)	318.419
Gowa	24.544 (13,1%)	162.564 (86,54%)	688 (0,36%)	187.796
Takalar	2.274 (4,4%)	92.214 (97,56%)	27 (0,0%)	94.515
Jeneponto	4.062 (3,2%)	123.301 (96,97%)	26 (0,0%)	127.389
Bantaeng	1.696 (2,7%)	61.677 (97,28%)	27 (0,0%)	63.400
Bulukumba	8.686 (5,8%)	141.111 (94,16%)	53 (0,0%)	149.850
Selayar	9.973 (19,2%)	41.438 (79,89%)	453 (0,87%)	51.864
Sirjai	9.702 (12,3%)	69.163 (87,59%)	96 (0,12%)	78.961
Bone	5.478 (1,4%)	388.956 (98,58%)	119 (0,03%)	394.553
Wajo	3.403 (1,6%)	204.825 (98,36%)	8 (0,0%)	208.236
Soppeng	10.219 (7,9%)	118.479 (92,05%)	12 (0,0%)	128.710
Sirap	12.966 (10,1%)	119.947 (98,85%)	12 (0,01%)	127.925
Enrekang	2.191 (3,4%)	62.543 (92,02%)	7 (1,28%)	64.741
Tana Toraja	876 (0,5%)	162.114 (98,18%)	2.116 (0,04%)	165.106
Luwu	23.937 (9,2%)	232.501 (90,66%)	3 (0,04%)	246.441
Mamuju	333 (0,6%)	54.515 (99,38%)	2 (0,02%)	54.850
Majene	2.320 (3,4%)	66.645 (96,6%)	12 (0,01%)	68.977
Polmas	12.759 (30,9%)	28.482 (68,1%)	566 (1,35%)	41.807
Pinrang	16.854 (13,0%)	122.456 (87,74%)	254 (0,18%)	139.564
Pare-pare	12.816 (30,7%)	28.482 (68,72%)	420 (1,0%)	41.718
Baru	11.795 (17,2%)	58.837 (82,76%)	37 (0,05%)	68.669
Pangkep	4.695 (3,9%)	113.456 (95,99%)	41 (0,03%)	118.192
Maros	6.718 (6,5%)	95.361 (95,99%)	352 (0,34%)	102.431
Jumlah	311.629 (10,1%)	2.762.671 (89,34%)	17.928 (0,57%)	3.092.228

Sumber Data : Arsip DPW GOLKAR Sulawesi Selatan

HASIL PEMILIHAN UMUM SEMUA OPP TAHUN 1987

Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 1987			Total Pemilih
	PPP (%)	Golkar (%)	PDI (%)	
2	3	4	5	6
Ujung Pandang	133.204 (32,8%)	250.205 (67,76%)	21.684 (5,35%)	405.093
Gowa	17.302 (7,8%)	201.100 (91,50%)	1.379 (0,62%)	219.781
Takalar	3.873 (4,8%)	103.452 (95,24%)	159 (0,14%)	107.484
Jenepono	5.934 (4,2%)	135.990 (95,75%)	96 (0,06%)	142.020
Bantaeng	1.096 (1,5%)	74.265 (98,50%)	28 (0,03%)	75.389
Bulukumba	7.178 (4,3%)	157.993 (95,51%)	245 (0,14%)	165.416
Selayar	9.260 (17,1%)	44.128 (81,58%)	700 (1,29%)	54.088
Sirjai	6.950 (7,8%)	81.765 (928,06%)	100 (0,11%)	88.815
Bone	10.382 (3,2%)	313.021 (96,60%)	606 (0,18%)	324.009
Wajo	9.160 (4,3%)	202.743 (95,65%)	55 (0,02%)	211.958
Soppeng	7.735 (5,9%)	122.707 (92,04%)	427 (0,32%)	130.869
Sidrap	5.522 (4,4%)	118.825 (95,49%)	78 (0,06%)	124.425
Enrekang	3.496 (8,7%)	63.701 (94,73%)	43 (0,06%)	67.240
Tana Toraja	975 (0,6%)	165.338 (96,9%)	4.216 (2,47%)	170.529
Luwu	20.002 (6,9%)	266.599 (92,04%)	3.047 (1,05%)	289.648
Mamuju	4.420 (6,2%)	66.600 (93,65%)	90 (0,12%)	71.110
Majene	4.291 (5,9%)	67.817 (93,99%)	44 (0,06%)	72.152
Polmas	14.787 (7,5%)	181.222 (92,06%)	822 (0,41%)	196.831
Pinrang	18.723 (1313,1%)	123.331 (86,32%)	810 (0,56%)	142.864
Pare-pare	29.860 (21,7%)	34.037 (52,01%)	1.536 (2,34%)	65.433
Barro	10.651 (14,2%)	64.167 (85,57%)	151 (0,26%)	74.869
Pangkep	7.646 (6,2%)	116.191 (93,72%)	127 (0,10%)	123.964
Maros	7.516 (6,7)	102.882 (92,08%)	1.323 (1,18%)	111.721
Jumlah	299.263 (8,8%)	3.063.395 (90,1%)	37.250 (10,95%)	3.339.908

Sumber Data : Arsip DPW GOLKAR Sulawesi Selatan

LAMPIRAN VI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A.R. MADJI

Abdul Rahim Mandji

Tempat tanggal Lahir, Pinrang. 16 Jun] 1926. Agama Islam. Pekerjaan sebelum menjadi Anggota MPR/DPR ; DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan Organisasi/unsur: Golkar

Anggota DPR dari : DPR mewakili Dati II Barru Sulawesi Selatan

: Kep.Pres.RI. Nomor: 150/m Tahun 1982

Riwayat Pendidikan :

a. Umum

- (1) Tahun 1940: H.I.S. Berijasah
- (2) Tahun 1941 : MULO Tidak Berijasah
- (3) Tahun 1966 : Fak. Sospol - belum tamat

b. Khusus

- (1) Tahun 1954 : Kursusu Aplikasi perwira Ajudan Jenderal AD di Bandung
- (2) Tahun 1958 : Kursus Kupaltu di Bandung
- (3) Tahun 1958 : Kursus Kupalda di Bandung
- (4) Tahun 1974 : Kursus orientasi pembangunan para pimpinan DPRD I Jakarta

Riwayat Pekerjaan :

a. Sebelum 17 Agustus 1945,

- (1) Tahun 1943 : Pegawai Kantor DOBUKU Pare-pare
- (2) Tahun 1944 : Pegawai kantor Doune Pare-pare

b. Sesudah 17 Agustus 1945,

- (1) Tahun 1950 - 1969 : Anggota ABRI
- (2) Tahun 1965 - Sekarang : Anggota DPRD Tingkat I
- (3) Tahun 1971 - Sekarang : Anggota MPR - RI

Riwayat Dalam Kehidupan Organisasi

a. Sebelum 17 Agustus 1945,

b. Sesudah 17 Agustus 1945,

- (1) Tahun 1954 - 1969 : Anggota ABRI
- (2) Tahun 1970 : Ketua Umum SEKBER Golkar
- (3) Tahun 1979 : Ketua DPD TK I Sulawesi Selatan
- (4) Tahun 1980 - Sekarang : Anggota Dewan Pertimbangan Golkar

Riwayat Perjuangan

- (1) Tahun 1945 : Jepang menyerah, aktif pada seinenden/ BOTAI SINTAI.
- (2) 1945-1946 : Staf pimpinan Kesatuan BPRI/TRIPS Ganganan Daerah Pare-Pare dan Soppeng.
- (3) Tahun 1947-1949 : ditahan oleh tentara Belanda.
- (4) 1949-1951 : Berturut-urur sebagai komandan pasukan pembesasa kota Sidrap, Pangkajene, Pare-Pare dan Pinrang dari tangan Belanda. Komando kompi Bataliyon Pacekke (Bataliyon 719 ko pas "A" T.T.VII)
- (5) Tahun 1959- 1960 : Ikut dalam penumpasan GPL DI/TII Kahar Muzakar dan pelarian PRRI, PERMESTA.
- (6) Tahun 1965-1966 : Ikut dalam penumpasan G-30.S.PKI Daerah Kalimantan Selatan."